



RENSTRA 2024-2026

Dinas Pendidikan
Kota Bandung



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 2022, analisis atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang Pendidikan sampai saat ini. Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dasar secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

Semua elemen Dinas Pendidikan Kota Bandung harus melaksanakan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 6

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bandung 14

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan 30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG39

3.1. Permasalahan Dinas Pendidikan Kota Bandung 39

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 42

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung 46

3.4. Isu-isu Strategis Kota Bandung 52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN54

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung..... 54

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 55

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN59

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....93

BAB VIII PENUTUP.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam
Penyeleggaraan Pendidikan 3

Gambar 1. 2. Keterkaitan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen
Perencanaan 6

Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota
Bandung 14

Gambar 2. 2. Rumus Indeks Pembangunan Manusia..... 18

Gambar 2. 3. Rumus Angka Harapan Lama Sekolah..... 19

Gambar 2. 4. Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah Kota
Bandung Tahun 2018-2022 20

Gambar 2. 5. Rumus Angka Rata-rata Lama Sekolah..... 21

Gambar 2. 6. Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota
Bandung Tahun 2018-2022 21

Gambar 2. 7. Angka Kelulusan Sekolah Dasar 24

Gambar 2. 8. Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama..... 24

Gambar 2. 9. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang SD 25

Gambar 2. 10. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang SMP 26

Gambar 2. 11. Logic Model..... 38

Gambar 3. 1. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 49

Gambar 3. 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Bandung 14

Tabel 2. 2. Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 15

Tabel 2. 3. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018-2022 16

Tabel 2. 4. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas 17

Tabel 2. 5. IPM Kota Bandung tahun 2020 s.d 2022 18

Tabel 2. 6. Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2018-2022 22

Tabel 2. 7. Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2018-2022 22

Tabel 2. 8. Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Rombongan Belajar di Kota Bandung Tahun 2021 27

Tabel 2. 9. Angka Anak Putus Sekolah Kota Bandung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022..... 28

Tabel 2. 10. Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C 30

Tabel 2. 11. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 31

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung..... 55

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 55

Tabel 4. 3. Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026..... 56

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan 60

Tabel 6. 1. Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....66

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah visi dan misi besar bagi negara Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya pada tahun 2045, Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Melalui program ini, diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang stabil, makmur, dan adil bagi seluruh warganya pada tahun 2045.

Para pakar memprediksi pada tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi yaitu jumlah usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Tantangan dari fenomena tersebut adalah Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia dengan matang, untuk itu dalam pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah ikut menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan fokus pada tujuan secara global peningkatan kualitas pendidikan. Generasi Indonesia Emas 2045 bisa dibentuk dengan ditingkatkannya kualitas pendidikan. Infrastruktur yang memadai dan kualitas pengajar yang merata pun bisa mendukung lahirnya Generasi Emas 2045. Kualitas Sumber Daya Manusia tentunya bisa menunjang segala aspek kehidupan bangsa diantaranya aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan politik.

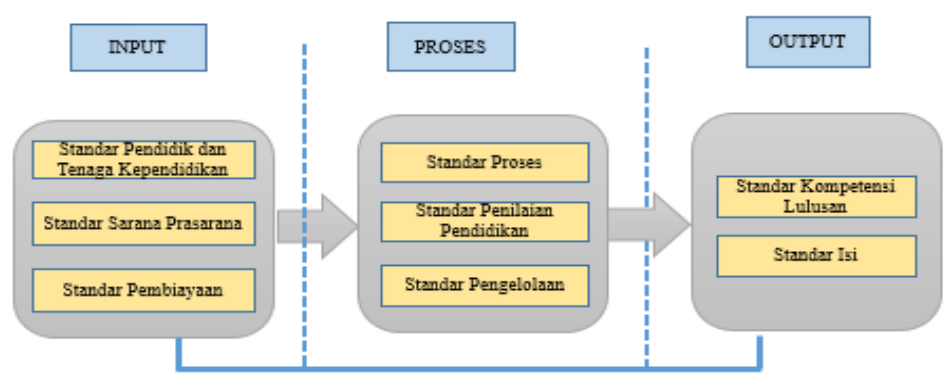
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendidikan membantu meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk memahami dan memajukan perubahan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan-tujuan SDGs yaitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama untuk hidup dengan sejahtera dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya. Melalui pendidikan, individu dapat memahami dan memajukan perubahan yang positif dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim, serta pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan-tujuan SDGs.

Untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan mencapai SDGs, pendidikan harus ditingkatkan dan didesain dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan zaman. Pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, seperti literasi digital, literasi lingkungan, dan literasi keuangan. Pendidikan juga harus membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti kerjasama, toleransi, dan kepekaan sosial. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menjamin bahwa pendidikan berkualitas tersedia bagi semua orang, tanpa terkecuali, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ini akan membantu membangun masyarakat yang mampu memajukan pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan-tujuan SDGs.

Tujuan Pendidikan Nasional yang dipaparkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 adalah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan yang menjadi

salah satu faktor utama dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkontribusi dalam segala kegiatan hidup berbangsa dan bernegara, harus dirancang secara strategik dan direalisasikan dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang terjadi secara masif saat ini, dan pendidikan mampu menjadi hak dasar warga negara Indonesia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan tentu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan menjadi faktor penting yang mempengaruhi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 terdiri dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, dan standar isi.



Gambar 1. 1. Keterkaitan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Delapan standar tersebut memegang peranan yang sangat penting dan memiliki kesinambungan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, dan Pembiayaan sangat menunjang proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Salah satu upaya pemerintah saat ini dalam memaksimalkan penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan adalah dengan memprakarsai Program Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih sendiri pelajaran yang mampu mengantarkan peta pendidikan masa depan yang menjadi pilihan setiap peserta didik. salah satu bentuk merdeka belajar adalah melalui penyelenggaraan sekolah penggerak yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik. Dalam hal ini kemampuan guru dan kepala sekolah menjadi ujung tombak utama untuk melaksanakan transformasi pendidikan kepada peserta didik, sehingga kompetensi dan kredibilitas tenaga pendidik dan kepemimpinan kepala sekolah perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik dalam belajar, meningkatkan prestasi peserta didik, dan hasil pendidikan yang kompeten melalui cara mengajar yang kreatif dan mengembangkan diri secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain sekolah dan guru penggerak, untuk mendukung terwujudnya merdeka belajar yang menjadi program unggulan kemendikbud, kurikulum sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah berdasarkan pendekatan minat dan bakat peserta didik, dan dibutuhkan kerjasama antara pusat dan daerah, serta komitmen yang dibangun semua pihak di sekolah untuk memaksimalkan terselenggaranya program tersebut.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak di daerahnya memiliki akses yang sama untuk pendidikan berkualitas dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya. Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pendidikan yang berkualitas tersedia dan diakses oleh semua anak. Ini

meliputi fasilitas sekolah yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan. Daerah juga harus memastikan bahwa guru dan staf sekolah memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini, daerah dapat memastikan bahwa pendidikan di daerahnya memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensinya.

Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom-up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram. Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang.

Merujuk pada kondisi di atas maka penting kiranya untuk disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengantisipasi tantangan pendidikan di masa yang akan datang dan menjadi arahan bagi pemangku kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Bandung.

Adapun penyusunan renstra dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dinas Pendidikan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

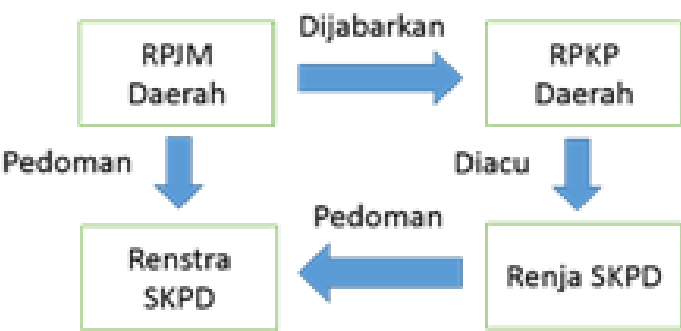
b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra

Rapat koordinasi ini diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kota Bandung serta *stakeholder* lainnya, dengan materi rancangan awal Renstra.

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi kemudian disusun Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sementara itu, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2. Keterkaitan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan

- 1. Hubungan Renstra dengan RPJMD
RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.
- 2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan (Renja-SKPD)
Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024–2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK;
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 19) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

- 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042;
- 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
- 25) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi serta melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi, khususnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

b. Tujuan

- 1. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- 2. Membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bandung kedalam program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan	Berisi uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud, dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.
BAB II	Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan	Memuat informasi tentang peran, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan	Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan: telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan bidang pendidikan di Kota Bandung.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program beserta indikator kinerja, pagu indikatif target.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

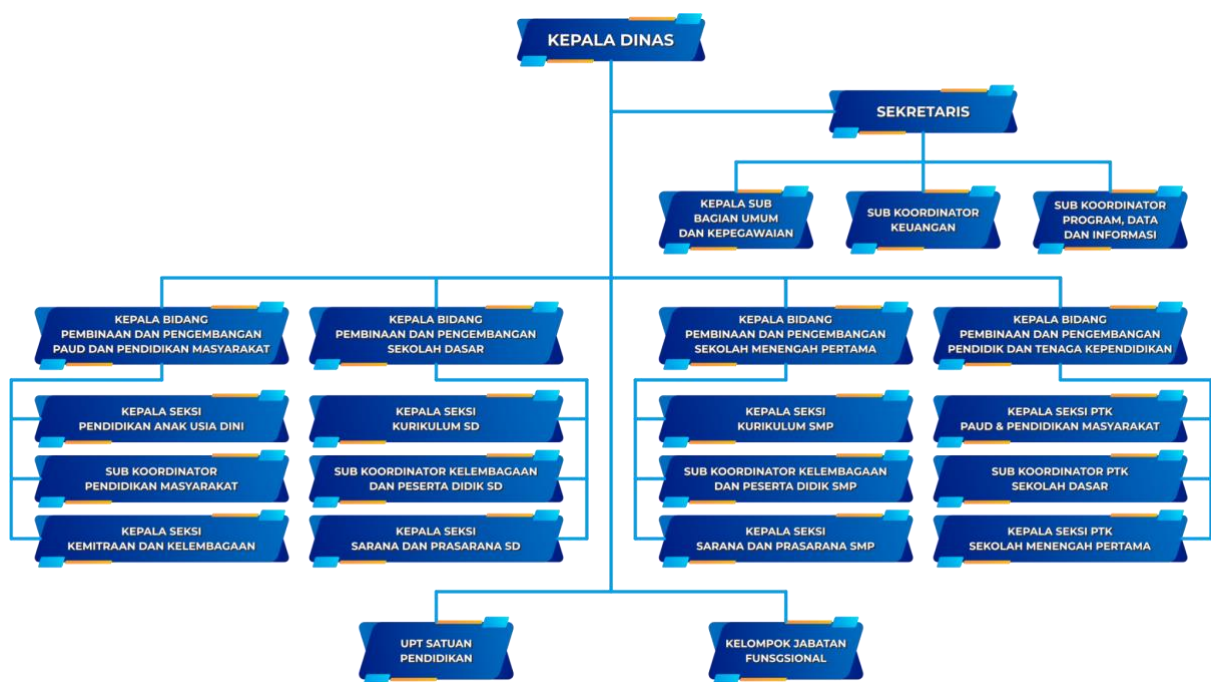
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator Keuangan;
 - 3) Sub Koordinator Program, Data dan Informasi,
- c. Kepala Seksi Bidang Pembinaan & Pengembangan PAUD & Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
- 1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat
 - 3) Kepala Seksi Kemitraan & Kelembagaan PP PAUD DIKMAS
- d. Kepala Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
- 1) Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
 - 2) Sub Koordinator Kelembagaan & Peserta Didik Sekolah Dasar
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
- e. Kepala Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
- 1) Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
 - 2) Sub Koordinator Kelembagaan & Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - 3) Kepala Seksi Sarana & Prasarana Sekolah Menengah Pertama
- f. Kepala Bidang Pembinaan & Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
- 1) Kepala Seksi Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - 2) Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - 3) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung:



Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bandung

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Bandung termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar sampai dengan bulan November 2022 sebanyak 256 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Asset, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program Data dan Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Bandung

No	Jenis Jabatan	Kantor Dinas Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Total
1	Pejabat Struktural	20			20
2	Kepala Sekolah		305		305

No	Jenis Jabatan	Kantor Dinas Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Total
3	Pejabat Pelaksana	82			82
	- Pengelola Keuangan		62		62
	- Analis TU		38		38
	- Pengadministrasi Umum		166		166
	- Pramuk Kelas		101		101
4	Jabatan Fungsional Guru		7.295	487	7782
5	Jabatan Fungsional Selain Guru				0
	- Analis Kepegawaian Muda	1			1
	- Analis Kepegawaian Pertama	5			5
	- Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1			1
6	Pengawas Sekolah	86			86
7	Penilik	39			39
8	Pamong Belajar	22			22
	Total	256	7.967	487	8.710

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Tahun 2022

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 17.775 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
SD	334	15	102	55	8510	258	4	9278
SMP	83	19	15	63	4287	498	4	4969
TK	174	54	27	29	1312	22	1	1619

Jenjang	<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
PAUD NON FORMAL	1250	80	32	89	455	3	0	1909
Total	1841	168	176	236	14564	781	9	17775

Sumber: Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2022

Berdasarkan data tenaga pendidik tersebut, diketahui bahwa tenaga pendidik pada jenjang SD berjumlah 9.278 orang, pada jenjang SMP berjumlah 4.969 orang, pada jenjang TK berjumlah 1.619 orang dan pada jenjang PAUD Non Formal berjumlah 1.909 orang.

2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2018-2022 serta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2018	Rp. 411.904.967.463,00	Rp. 344.363.771.799,00	83,60
2	2019	Rp. 1.060.239.234.094,91	Rp. 558.145.131.897,00	52,64
3	2020	Rp. 521.869.537.061,85	Rp. 467,552,770,738.00	89,59
4	2021	Rp. 1.731.995.934.274,00	Rp. 1.578.704.999.659,00	91,15
5	2022	Rp. 1.954.570.734.501,00	Rp. 1.651.307.573.399,00	84,48

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2022 yang meningkat dibanding dengan anggaran 2021, yakni mengalami kenaikan sebesar 12,85%. Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebanyak 84,48% (Rp.1.651.307.573.399,00) dari alokasi anggaran yang dianggarkan yakni sebesar Rp.1.954.571.734.501,00.

3. Sarana Prasarana Instansi

Dinas Pendidikan Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No 239, Bandung, Secara

umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
PAUD NON FORMAL	653	1.899	385	38	1
SD	473	5.837	605	225	25
SMP	260	3.663	1.298	860	193
TK	467	1.660	275	30	1
Total	1.853	9.140	2.563	1.153	220

Sumber: Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Tahun 2022

Berdasarkan jumlah sekolah dan kondisi ruang kelas tersebut, jumlah sekolah PAUD Non Formal, SD, SMP dan TK total keseluruhannya adalah sebanyak 1.853 sekolah. Sementara itu jumlah ruang kelas adalah sebanyak 9.140 ruang kelas. Adapun rusak ringan sebanyak 2.563, rusak sedang sebanyak 1.153 dan rusak berat sebanyak 220.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM

juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, rumus untuk menghitung IPM adalah sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Menghitung IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Gambar 2. 2. Rumus Indeks Pembangunan Manusia

Keterangan:

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

Adapun data Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung tahun 2020 s.d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5. IPM Kota Bandung tahun 2020 s.d 2022

Komponen IPM (Metode Baru)	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,00	74,14	74,28	74,46	74,75
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,18	14,19	14,20	14,21	14,23
Rerata Lama Sekolah (Tahun)	10,63	10,74	10,75	10,99	11,00
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp)	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639

Komponen IPM (Metode Baru)	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	81,06	81,62	81,51	81,96	82,50
Pertumbuhan IPM	0,93	0,69	-0,13	0,55	0,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data IPM Kota Bandung tersebut, pertumbuhan IPM pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,55 dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,66. Dengan demikian pembangunan manusia di Kota Bandung terus mengalami kemajuan.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

- EYS_a^t Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t
- E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t
- i Usia ($a, a+1, \dots, n$)
- FK Faktor koreksi

Gambar 2. 3. Rumus Angka Harapan Lama Sekolah

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2018-2022. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berikut grafik capaian indikator Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022



Gambar 2. 4. Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kota Bandung Dalam Angka), 2022

Berdasarkan grafik diatas, angka harapan lama sekolah di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2022 berusia 7 tahun ke atas (usia sekolah) memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,23 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,02 tahun dari tahun sebelumnya yang 14,21 tahun.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang dialami oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga merupakan indikator makro yang

perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

- RLS* Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- x_i* Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t*
- n* Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Gambar 2. 5. Rumus Angka Rata-rata Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa RLS ini diartikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk melaksanakan pendidikan formal. RLS juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat pada suatu wilayah. Besaran angka RLS dipengaruhi oleh angka putus sekolah di suatu wilayah. Berikut grafik capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah kota Bandung pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 2. 6. Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2018-2022

Sumber: Website Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik tersebut di atas, bahwa angka RLS Kota Bandung meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Penduduk usia 25 tahun ke atas di kota Bandung, menggunakan waktunya selama 11 tahun untuk bersekolah formal, atau hingga kelas 2 SMA.

3. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Kasar berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Bandung tahun 2018-2022.

Tabel 2. 6. *Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2018-2022*

No	Angka Partisipasi Kasar	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUD	%	N/A	N/A	89,89	78,63	85,94
2	SD/MI/ Sederajat	%	106,89	102,93	103,06	103,70	102,50
3	SMP/MTs/ Sederajat	%	86,68	86,26	87,13	88,78	95,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, 2022

Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2022 untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu tingkat PAUD dan SMP/MTs mengalami peningkatan. Meski APK untuk jenjang sekolah menengah belum mencapai seperti halnya APK pada jenjang sekolah dasar, hal ini menjadi perhatian khusus agar peserta didik yang bersekolah terus dapat ditingkatkan.

4. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni adalah persentase peserta didik dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Berikut adalah Angka Partisipasi Murni berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Bandung tahun 2018-2022

Tabel 2. 7. *Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2018-2022*

No	Angka Partisipasi Murni	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI/ Sederajat	%	98,88	98,73	99,06	98,11	95,39

2	SMP/MTs/ Sederajat	%	79,58	80,00	80,66	71,20	85,14
---	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, 2022

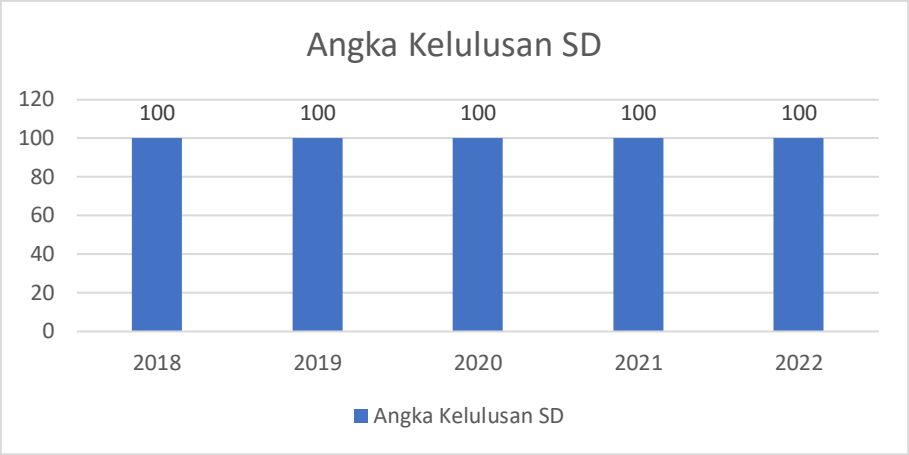
Capaian tingkat APM Kota Bandung pada tahun 2022 untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu APM untuk tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan. Meski data menunjukkan angka yang fluktuatif, masih menjadi tugas dari Pemerintah Daerah bersama-sama seluruh *stakeholders* untuk dapat terus meningkatkan capaian APM.

5. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan peserta didik Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah peserta didik peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu X 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan peserta didik dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang sekolah dasar dan tahun ketiga untuk jenjang sekolah menengah pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali peserta didik untuk dapat lulus di ujian sekolah. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa peserta didik-siswi di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian sekolah.

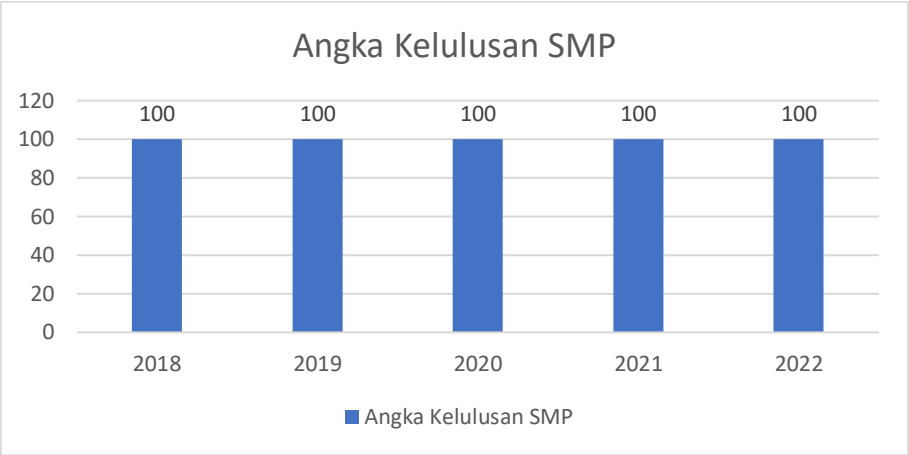
Berikut grafik capaian indikator angka kelulusan tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:



Gambar 2. 7. Angka Kelulusan Sekolah Dasar

Berdasarkan grafik diatas, Angka Kelulusan pada tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan angka 100.00%.

Berikut grafik capaian indikator angka kelulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:



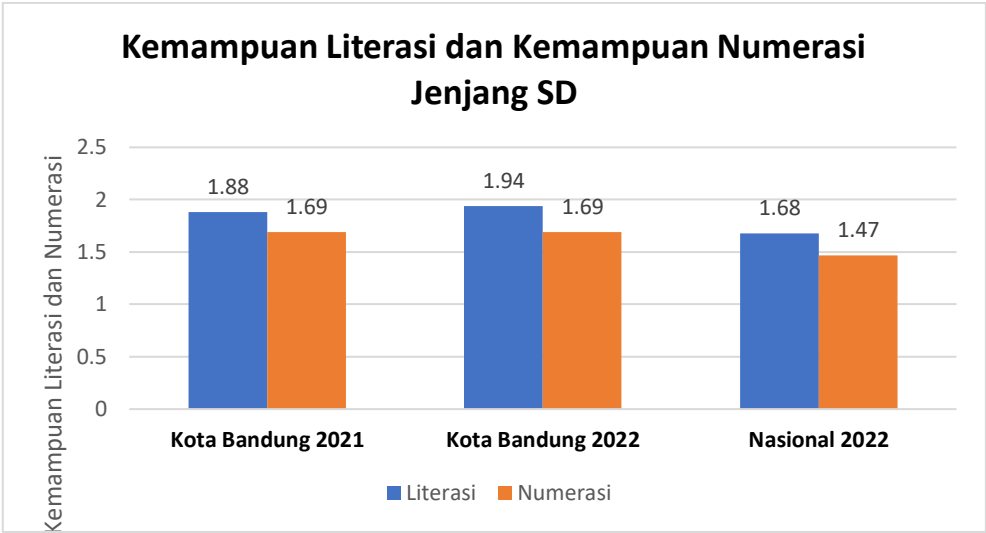
Gambar 2. 8. Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan grafik diatas, Angka Kelulusan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan angka 100.00%. Indikator kinerja ini telah terealisasi sesuai target dengan persentase capaian sebesar 100.00% sesuai target.

6. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika yang diperlukan berbagai

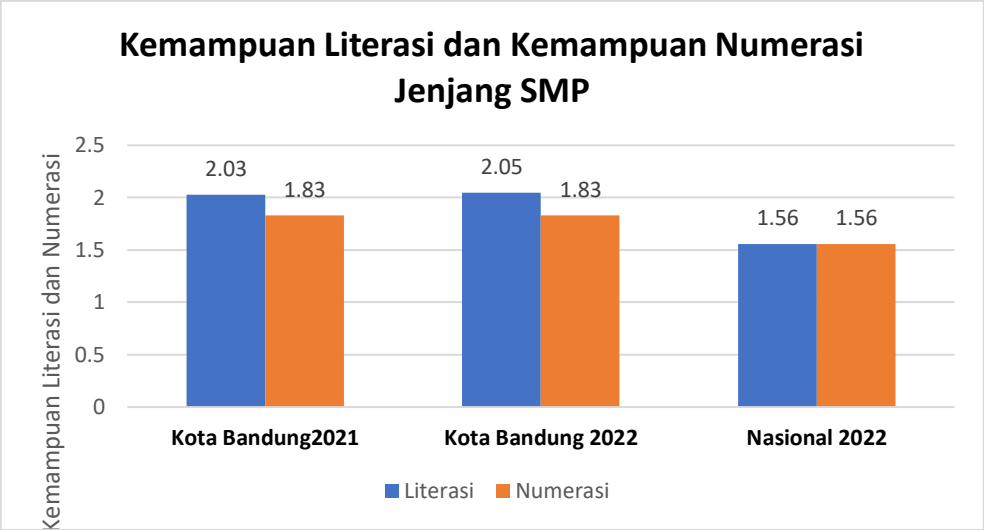
konteks, baik personal, sosial maupun profesional. Adapun data mengenai kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 9. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang SD

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (Data Diolah), 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi pada Jenjang SD di Kab/Kota tahun 2021 sebesar 1,88 dan meningkat menjadi 1,94 di tahun 2022; nilai rata-rata di nasional memperoleh sebesar 1,68. Sedangkan untuk kemampuan numerasi pada Jenjang SD di Kab/Kota serupa di tahun 2021 sebesar 1,69 dan masih pada nilai yang sama di tahun 2022; nilai rata-rata di nasional sebesar 1.47. Angka rata-rata kemampuan literasi Kab/Kota memang sudah lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata kemampuan literasi nasional. Namun angka tersebut akan semakin bernilai baik apabila mendekati angka batas maksimum pencapaian yaitu 3. Adapun data kemampuan literasi dan numerasi jenjang SMP adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 10. Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang SMP

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (Data Diolah), 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi pada Jenjang SMP di Kab/Kota tahun 2021 sebesar 2,03 dan meningkat menjadi 2,05 di tahun 2022; nilai rata-rata di nasional memperoleh sebesar 1,56. Sedangkan untuk kemampuan numerasi pada Jenjang SMP di Kab/Kota serupa di tahun 2021 sebesar 1,83 dan masih pada nilai yang sama di tahun 2022; nilai rata-rata di nasional sebesar 1,56. Angka rata-rata kemampuan literasi Kab/Kota memang sudah lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata kemampuan literasi nasional. Namun angka tersebut akan semakin bernilai baik apabila mendekati angka batas maksimum pencapaian yaitu 3.

7. Rasio Penduduk Terhadap Rombongan Belajar

Indikator rasio penduduk terhadap rombongan belajar menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk terhadap jumlah rombongan belajar per masing-masing jenjang pendidikan. Mengacu pada data periode 2019-2022, secara umum rasio penduduk terhadap rombongan belajar pada jenjang SD menunjukkan masih belum mencapai kepadarasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah penduduk pada usia jenjang pendidikan SD dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia berlebihan. Data rasio penduduk terhadap

rombongan belajar tahun 2019-2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 8. Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Rombongan Belajar di Kota Bandung Tahun 2021

No.	Rasio Penduduk thd Rombel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk Usia SD thd Rombel SD	N/A	30,50	30,44	30,99	30,78
2	Rasio Penduduk Usia SMP thd Rombel SMP	N/A	33,09	33,94	34,46	34,63

Sumber: Subbagian Program, Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2022

Ideal rasio penduduk usia SD terhadap rombongan belajar SD adalah 28, sedangkan ideal rasio penduduk usia SMP terhadap rombongan belajar SMP adalah 33. Data yang tersedia, pada tahun 2022 menunjukkan rasio penduduk terhadap rombongan belajar pada jenjang Sekolah Dasar sebesar 30,78 dan rasio penduduk terhadap rombongan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 34,63.

8. **Angka Putus Sekolah**

Angka anak putus sekolah yang dimaksud merujuk pada pengukuran persentase anak yang tidak mengenyam pendidikan pada rentang usia sekolah yang seharusnya menerima pendidikan. Meskipun ada kemungkinan bahwa anak-anak yang tidak sekolah pada usia sekolah juga termasuk dalam kategori anak putus sekolah, namun tidak semua anak yang tidak sekolah pada usia sekolah juga dihitung sebagai anak putus sekolah. Sebaliknya, angka anak putus sekolah hanya mencakup anak-anak yang seharusnya menyelesaikan suatu tingkat pendidikan, tetapi tidak berhasil melakukannya.

Tabel 2. 9. Angka Anak Putus Sekolah Kota Bandung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI:	0,01%	0,01%	0,01%	0,003%	0,0049%
2	SMP/MTs:	0,01%	0,02%	0,02%	0,000%	0.000%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan data tabel angka anak putus sekolah di atas, pada jenjang SD tahun 2021 sebesar 0,003% dari keseluruhan jumlah peserta didik jenjang SD. Pada jenjang SMP, tidak ada anak putus sekolah yang terdata.

Alasan yang mendasari anak putus sekolah bukan hanya dari masalah ekonomi saja. Namun, pada banyak kasus, anak yang pada akhirnya putus sekolah mengalami masalah-masalah sosial dan budaya. Baik dari masalah internal seperti di keluarga dan masalah eksternal pada lingkungan sekitar yang membuat anak menjadi bermasalah hingga berakhir menjadi putus sekolah.

Angka anak tidak sekolah pada usia sekolah dapat dihitung dengan membagi jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan pada rentang usia sekolah tertentu dengan jumlah total anak yang seharusnya menerima pendidikan pada rentang usia tersebut, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%.

9. **Indikator Terkait Anak Tidak Sekolah**

Berdasarkan Pasal 28A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas pendidikan. Oleh karena itu, peraturan atau kebijakan yang ada harus memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Namun, kenyataannya masih ada anak yang tidak sekolah di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, seperti kemiskinan, jarak tempuh sekolah yang jauh, diskriminasi gender, kurangnya fasilitas pendidikan, dan lain-lain.

Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seorang anak tidak sekolah. Beberapa di antaranya adalah:

1. Tidak terdaftar di sekolah: Anak yang tidak terdaftar di sekolah merupakan indikator utama dari ketidaksekolahan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kemiskinan, jarak tempuh sekolah yang jauh, dan lain-lain.
2. Tidak mengikuti pembelajaran secara rutin: Anak yang tidak mengikuti pembelajaran secara rutin juga bisa menandakan bahwa mereka tidak sekolah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan, pekerjaan, atau alasan lainnya.
3. Tidak menguasai keterampilan dasar: Anak yang tidak menguasai keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, bisa menandakan bahwa mereka tidak sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
2. Tidak memiliki sertifikat pendidikan: Anak yang tidak memiliki sertifikat pendidikan, seperti Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), juga bisa menandakan bahwa mereka tidak sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan mereka.
3. Bekerja sebagai pekerja anak: Anak yang bekerja sebagai pekerja anak bisa menandakan bahwa mereka tidak sekolah atau putus sekolah. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya karena masalah kemiskinan atau lainnya.

Indikator-indikator ini bisa membantu untuk mengidentifikasi masalah ketidaksekolahan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merancang kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak.

10. Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C

Kejar paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), kejar paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kejar paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Adapun tabel jumlah peserta didik paket A, B dan C adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 10. Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C

No	Jenjang	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Paket A	329	447	505	651	651
2	Paket B	1.111	1.523	1.825	2.290	2.290
3	Paket C	2.334	4.660	4.481	5.514	4.821
JUMLAH		3.774	6.630	6.811	8.455	7.762

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 data menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah peserta didik dari tahun 2021 yaitu jumlah peserta didik pada tahun 2022 berjumlah 7.762 dan pada tahun 2021 berjumlah 8.455. jumlah peserta didik dalam 5 Tahun terakhir paling tinggi ada pada jenjang Paket C atau setara dengan SMA berjumlah 21.810, kedua ada pada jenjang Paket B atau setara SMP yaitu berjumlah 9.039 dan terakhir ada Program jenjang Paket A atau setara SD yaitu berjumlah 2.583.

Layanan Pendidikan kesetaraan ini merupakan jalur alternatif dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat maupun peserta didik yang putus sekolah atau siapapun yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan formal karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Analisis SWOT merupakan suatu teknik strategi perencanaan yang dilaksanakan melalui identifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam menyusun perencanaan yang baik. Kekuatan (*Strength*) bersumber dari kondisi internal yang dimiliki Dinas Pendidikan, Kelemahan (*Weakness*) bersumber dari kondisi Internal yang terdapat pada Dinas

Pendidikan, Peluang (*Opportunity*) bersumber dari kondisi eksternal, Ancaman (*Threat*) bersumber dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan.

Analisis SWOT terhadap penyelenggaraan pendidikan akan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh. Dalam hal ini, keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan akan ditentukan oleh kemampuan Dinas Pendidikan dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

11. Analisis SWOT

Tabel 2. 11. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

ANALISIS SWOT	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Kecilnya angka putus sekolah dikarenakan oleh adanya peningkatan fasilitas pendidikan. 2. Angka Kelulusan pada tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka 100.00%. 3. Capaian tingkat APK PAUD Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu dari 76,83 pada tahun 2022 mencapai angka 85,94 4. Capaian tingkat APK dan APM Kota Bandung pada tahun 2021 untuk tingkat tingkat SMP/MTs. mengalami peningkatan	1. Capaian tingkat APK dan APM Kota Bandung pada tahun 2021 untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan. 2. Masih belum meratanya kualitas tenaga pendidik yang mampu berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan secara optimal. 3. Masih belum optimalnya produktivitas kinerja yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

	5. Kemampuan literasi dan numerasi tingkat Kota pada jenjang SD dan SMP memiliki rata-rata melebihi tingkat nasional dan provinsi. 6. Kemampuan literasi dan numerasi tingkat kota pada jenjang Paket A dan Paket B memiliki rata-rata melebihi tingkat nasional dan provinsi 7. Alokasi anggaran di bidang penyelenggaraan pendidikan yang cukup besar dari APBD sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mewujudkan pengembangan dalam penyelenggaraan program pendidikan. 8. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dinilai cukup memadai yang bisa dilihat dari adanya kesesuaian antara kebutuhan SDM dengan jumlah SDM yang dimiliki untuk menjalankan program pelayanan Pendidikan. 9. Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas. 10. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan program layanan pendidikan. 11. Sebanyak 96% guru berkualifikasi minimal S1.	organisasi secara keseluruhan. 4. Masih ditemukan ketimpangan kualitas antar sekolah yang menimbulkan munculnya sekolah favorit. 5. Penyebaran sekolah yang tidak merata. 6. Kurangnya Regulasi dan Monitoring yang memadai dan sistem monitoring yang baik untuk memastikan kualitas penyelenggaraan lembaga pendidikan. 7. Terdapat guru yang masih belum berkualifikasi minimal S1. 8. 60 % PTK pada lembaga PNF (PKBM) mesih memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1 9. Masalah kebijakan terdapat kasus guru yang tidak S1 mendapatkan tunjangan S1, karena telah bekerja selama 50 Tahun. 10. Mindset ortu tidak ikut campur terhadap perkembangan peserta didik, semua di serahkan kepada guru. 11. Banyak lahan sekolah dasar yang kecil dan tidak memenuhi SNP
--	---	--

	12. Intervensi alat, tahun 2020-2021 dari SD, sebesar 50%-nya mendapatkan bantuan alat teknologi informasi (IT). 13. Ketersedian layanan pendidikan Nonformal yang berjumlah 85 PKBM dan 186 LKP yang tersebar di Kota Bandung, memberikan peluang layanan pendidikan yang dapat di akses lebih mudah oleh masyarakat.	12.Orangtua lebih mau membayar mahal guru les dibanding guru di sekolah 13.Masyarakat yang belum mengerti dan mengena secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan Nonformal 14.Krisis tenaga Pendidikan, dimana banyak guru-guru yang akan pensiun, namun untuk sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan guru non ASN baru. Sedangkan untuk sekolah swasta terdapat permasalahan linieritas guru. 15.Penggunaan teknologi tidak selalu produktif 16.Capaian APK APM tingkat SMP turun karena adanya pandemi covid. 17.Terdapat sekolah yang masih kekurangan peserta didik. 18.Kepala sekolah segan jika tidak menaikkan peserta didik.
OPPORTUNITY (O)	Strategi – SO	Strategi – WO
1. Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional sehingga banyak mendapat dukungan baik dari aspek sarana, anggaran maupun kebijakan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pada jenjang Pendidikan Dasar dan layanan pendidikan Nonformal 2. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan	1. Memberikan Bantuan Pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi

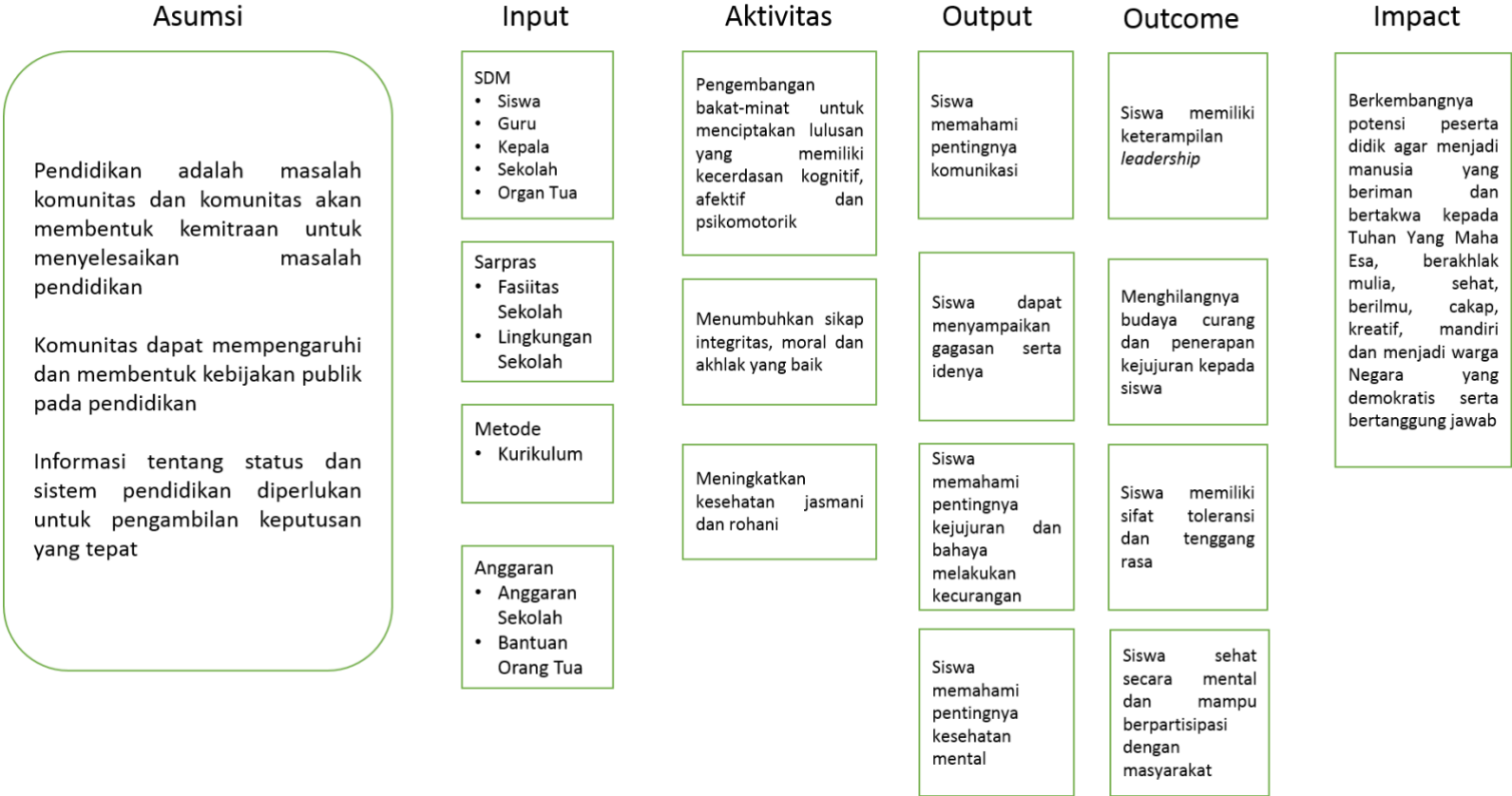
2. Kemajuan dunia teknologi informasi yang mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan aspek mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan 3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang berpengaruh terhadap peningkatan daya serap Pendidikan 4. Terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun lalu memberikan peluang bagi berkembangnya pembelajaran berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh. 5. Kualitas sekolah sudah tergambar di rapor pendidikan sehingga sekolah mempunyai 5 prioritas yang harus dikembangkan, 1. Literasi; 2. Numerasi; 3. Karakter; 4. Iklim Keamanan; dan 5. Iklim Kebhinekaan. 6. Anggaran masih besar untuk operasional sarana dan prasarana. 7. Pembelajaran berbasis digital masih menjadi potensi di mana dapat memberikan konten kepada peserta didik untuk dipelajari, guru menyiapkan/memproduksi bahan ajar/pembelajaran digital. 8. Komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif (15-64) mencapai 69,64% (1.760.359 jiwa). 9. Tahun 2022 tingkat kemiskinan kota Bandung	3. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pendidikan 4. Memberikan Bantuan Pendidikan Operasional untuk Pendidikan Dasar di Swasta 5. Mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar pada tiap satuan Pendidikan 6. Mengembangkan Kurikulum Lokal dan mengimplementasikan kepada tiap satuan Pendidikan 7. Meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. 8. Meningkatkan pemanfaatan bantuan alat IT dalam kegiatan penunjang pembelajaran. 9. Melakukan sosialisasi terkait layanan pendidikan masyarakat.	2. Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Workshop, Bimtek, Sosialisasi dan Kegiatan lainnya 3. Melakukan pemerataan terhadap sarana dan prasarana Sekolah 4. Membangun citra sekolah dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri 5. Mengoptimalkan pengembangan teknologi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan penyelenggaraan pendidikan. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan setiap sekolah untuk membangun kepercayaan masyarakat. 7. Adanya kerja sama yang harmonis dan sinergis antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah dalam membimbing peserta didik. 8. Meningkatkan teknologi pembelajaran atau teknologi yang tepat guna dalam
---	---	--

menurun dari tahun 2021 menjadi 4,25%. 10. Tahun 2021 dan 2022 nilai IPM kota Bandung mengalami peningkatan kembali, masing-masing 81,96 dan 82,50. Peningkatan IPM terjadi seiring dengan mulai terkendalanya pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil.		pengelolaan pendidikan. 9. Guru/kepala sekolah mempromosikan sekolah dengan memanfaatkan teknologi.
THREAT (T)	Strategi – ST	Strategi – WT
1. Terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun lalu yang mengubah tatanan pendidikan sehingga terjadinya Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) yang melanda semua aspek kehidupan. 2. Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah yang perlu diimbangi dengan infrastruktur. 3. Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan. 4. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), <i>Education For All</i> (EFA) dan <i>Education for Sustainable Development</i> (EfSD). 5. Hambatan aksesibilitas pendidikan yang diakibatkan oleh persoalan himpitan ekonomi keluarga. 6. Terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kota Bandung, pada tahun 2018 ke tahun 2019	1. Penyediaan program beasiswa untuk peserta didik dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. 2. Pelayanan bus antar jemput peserta didik. 3. Mengembangkan sekolah digital dalam pelayanan pendidikan. 4. Mengoptimalkan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 5. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan. 6. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara teoritis dan praktik lapangan. 7. Regulasi kebijakan mengenai kenaikan kelas perlu diatur kembali disesuaikan dengan kemampuan dan kualitas peserta didik.	1. Kesiadaan sekolah menerima peserta didik dari berbagai kalangan ekonomi tanpa terkecuali. 2. Instansi mendorong dan memfasilitasi pengembangan kompetensi pendidik untuk mengoptimalkan layanan pendidikan. 3. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sekolah dan penyedia beasiswa. 4. Mengoptimalkan teknologi untuk membantu produktivitas peran pendidik dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di era new normal.

mengalami peningkatan sebesar 8,91% dari 96.465 orang menjadi 105.087 orang. 7. Penyerapan angkatan kerja dengan kualifikasi belum setara SMA belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. 8. Kurang optimalnya peran serta perusahaan dalam mengatasi kualitas tenaga kerja yang berkualitas dan pelaporan serta penempatan tenaga kerja. 9. Meningkatnya resiko bencana, terutama bencana terkait perubahan iklim, akibat belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. 10. Dalam “Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung 2019”, kemacetan duduk di peringkat pertama sebagai permasalahan yang paling berat. 11. Kesetaraan dan kekerasan seksual. 12. Guru masih kesulitan dalam sinkronisasi beberapa mata pelajaran dengan program literasi dan numerasi. 13. Target literasi dan numerasi diharapkan di tahun 2026 dapat mencapai angka 60. 14. Kebijakan kurikulum 2013 yang cenderung memaksakan sekolah untuk menaikkan siswa dan adanya KKM yang memaksakan nilai mencapai KKM sehingga nilai tidak murni lagi. Hal tersebut mempengaruhi	8. Program strategis untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi bagi guru dan peserta didik.	5. Mengoptimalkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk pelaksanaan praktek lapangan. 6. Perekrutan pegawai oleh perusahaan diprioritaskan hanya dengan instansi/sekolah yang melaksanakan kerjasama. 7. Dunia usaha dan dunia industri ikut andil memberikan saran dan masukan terkait kebutuhan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. 8. Mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan tentang kesehatan dan kesiapsiagaan bencana. 9. Sistem zonasi dioptimalkan untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi kemacetan. 10. Diberikan sanksi hukuman kepada orangtua bagi siswa yang tidak sekolah karena faktor ekonomi dan sosial 11. Perbedaan kebutuhan anak dilayani oleh sekolah (sesuai dengan fase anak) tidak menerapkan KKM. Remedial sesuai dengan hasil asesmen awal, tidak diulang
--	---	--

kualitas siswa yang rendah. 15. Permasalahan keamanan lingkungan, dimana preman yang memungut biaya ketika pembangunan sekolah. 16. Adanya program kurikulum merdeka dan sekolah penggerak. 17. Ketimpangan sekolah dengan adanya sekolah favorit. 18. Terdapat bonus demografi dimana jumlag penduduk di Kota Bandung meningkat. 19. Adanya alasan anak tidak sekolah selain dari faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor sosial pada lingkungan dan keluarga. 20. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.		semua. Sistem file catatan siswa harus diperbaiki di sekolah. Adanya psikolog per zona (SMP, SD). 12. Dengan adanya sistem zonasi mengurangi ketimpangan sekolah favorit
---	--	--

Selain dari analisis SWOT, terdapat *logic model* yang merupakan alat yang menyampaikan skema, program atau proyek dalam format visual singkat yang menggambarkan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan.



Gambar 2. 11. Logic Model

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

3.1. Permasalahan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Permasalahan pada urusan pendidikan di Kota Bandung diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Capaian APK untuk jenjang PAUD pada tahun 2022 masih belum optimal yaitu mencapai angka sebesar 85.94 % akan tetapi melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 71.32 %.
2. Capaian APK Kota Bandung pada tahun 2022 untuk tingkat SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 103,7%. dan pada tahun 2022 sebesar 102,50%, yakni belum mencapai nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,73 %.
3. Capaian APK Kota Bandung pada tahun 2022 untuk tingkat SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 88,78% dan pada tahun 2022 sebesar 95,80 %, namun masih belum mencapai nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,25%.
4. APM jenjang SD pada tahun 2021 sebesar 98,11% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yakni sebesar 95,39%.
5. APM untuk jenjang SMP mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 mencapai angka 81,40 % sedangkan pada tahun 2022 sebesar 85,13%, tetapi masih belum mencapai nilai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,93%.
6. Masih belum optimalnya Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 13-15 pada tahun 2021 yaitu sebesar 95,09 %.
7. Jika melihat data BPS Kota Bandung mengenai persentase ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk berusia 15 tahun ke atas serta jumlah penduduk per tahun 2021, menjadi

tantangan dimana sebanyak 49.058 warga Kota Bandung yang tergolong tidak atau belum tamat SD, kemudian ada 380.690 warga yang tidak tamat SMP.

8. Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI/ sederajat ke SMP/ Sederajat di Kota Bandung yaitu sebesar 93,57%, sehingga masih terdapat peserta didik/ siswi yang tidak melanjutkan yaitu sebesar 6,43%.
9. Masih terdapat pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan kurang dari S1 (Sarjana) pada Jenjang TK Sebanyak 218 orang, jenjang Paud Non Formal 1.451 Orang, jenjang SD sebanyak 506 Orang, Jenjang SMP sebanyak 180 Orang, dan Jenjang SMA/ SMK sebanyak 153 Orang.
10. Ketersediaan ruang kelas pada seluruh jenjang pendidikan dengan kondisi rusak ringan mencapai 28%, kondisi rusak sedang mencapai 12,6% sedangkan pada kondisi rusak berat mencapai 2,4%.
11. Pendidikan inklusi yang masih perlu dibenahi dimana guru mendapatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas regulernya tanpa latar belakang pendidikan luar biasa dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, para guru melaksanakan tugas mengadakan pembelajaran meski seringkali terkendala karena kondisi peserta didik yang berbeda-beda (Damayanti, dkk 2017 jurnal dengan judul kompetensi guru dalam proses pembelajaran inklusi pada guru SD Negeri Kota Bandung). Selain itu jumlah piloting inklusif Kota Bandung berjumlah 9 sekolah, jumlah tersebut tidak sampai 10% dari jumlah sekolah di Kota Bandung. Berdasarkan data dapodik yang ada pada saat ini peserta didik inklusif di Kota Bandung berjumlah 1.000 orang.
12. Kota Bandung memiliki berbagai kondisi yang perlu diperbaiki untuk memanfaatkan peluang bonus demografi secara lebih maksimal, pada tahun 2030-2040 diprediksi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada non produktif.
13. Terdapat 238 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di tahun 2021, dan berdasarkan data LPKA sebanyak 9 orang anak yang berhadapan dengan kasus.

14. Berdasarkan data Rapor Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 yang diperoleh Dinas Pendidikan Kota Bandung terdapat 6 (enam) kategori penyimpangan sosial di sekolah yaitu : 1) Iklim Keamanan Sekolah, dalam hal ini masih terdapat 65 sekolah dengan kategori waspada, 19 sekolah rawan, 2) Perundungan/*Bullying*, dalam hal ini masih terdapat 31 sekolah dalam kategori waspada, dan 4 sekolah dalam kategori rawan, 3) Hukuman Fisik , sebanyak 90 sekolah masih dalam kategori waspada dan 14 orang dalam kategori rawan, 4) Kekerasan seksual, sebanyak 315 sekolah dengan kateri waspada dan sebanyak 119 sekolah dengan kategori rawan, 5) Kasus Narkoba di Sekolah, sebanyak 16 sekolah dalam kategori waspada dan sebanyak 29 sekolah dalam kategori rawan, 6) Iklim kesetaraan gender, sebanyak 22 sekolah masih perlu ditingkatkan.
15. Anak dengan kasus HIV-AIDS pada usia < 14 Tahun sebanyak 4 Orang dan pada usia 14-18 Tahun sebanyak 2 Orang, sedangkan data anak pengguna narkoba pada tahun 2021 pada rentang usia 15-16 Tahun sebanyak 17 orang.
16. Pada tahun 2020 menurut data UPT P2TP2A sekolah masih menjadi tempat kejadian kekerasan.
17. Cenderung menurunnya jumlah guru yang memenuhi standar, ditandai dengan turunnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2017 persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 98,00%, namun pada tahun 2021 turun menjadi hanya 93,93%.
18. Masih terdapat permasalahan mengenai kebijakan sertifikasi guru di Kota Bandung, Mulai kasus jual beli sertifikat, polemik kuota, hingga molornya pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) (Irawan, Hendra (2012) *Efektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Di Kota Bandung*. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia)
19. Guru yang tersertifikasi masing kurang dari 50%, dan pada tahun 2021, khususnya pada guru SD, baru mencapai angka 44,65 dan untuk guru SMP, baru mencapai angka 49%.

20. Usia guru mayoritas >50 tahun dengan potensi pensiun di waktu dekat, berpengaruh pada rasio guru: kelas: siswa.
21. Belum meratanya sekolah SMP Negeri di tiap kecamatan.
22. Jumlah sekolah dan ruang kelas cenderung bertambah, sementara jumlah peserta didik cenderung berkurang.
23. Masih cukup banyak sekolah yang akreditasinya belum unggul, SD sekitar sebanyak 24% dan SMP 32%.
24. Belum optimalnya penduduk usia sekolah 13 sampai 15 tahun yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya (SMP).
25. Masih adanya kekurangan dalam sistem Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga belum sesuai dengan harapan masyarakat.
26. Perubahan proses pembelajaran dari belajar di sekolah menjadi belajar di rumah sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
27. Penyebaran sekolah yang tidak merata.
28. Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
29. Masih ditemukan ketimpangan kualitas antar sekolah yang menimbulkan munculnya sekolah favorit.
30. Masih ada satuan Pendidikan Non Formal yang belum terdata dalam DAPODIK.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arahan utama presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk diantaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global”.

Adapun Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 adalah: **“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk**

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.”

Untuk itu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan nawacita kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusi;
- b. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan anak;
- c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
- d. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus- utamaannya dalam pendidikan;
- e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di semua jenjang;
- b. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
- c. Menguatnya karakter peserta didik;
- d. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;

- e. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemdikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di semua jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, kebijakan merdeka belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud RI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
- b. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
- c. Peningkatan Relevansi Pendidikan
- d. Peningkatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter
- e. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

2. Telaahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pendidikan menengah adalah: Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu, serta Tata Kelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting untuk menuju keberhasilan pembangunan pendidikan yang dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik Pendidikan Menengah (16-18 tahun) dan Pendidikan Khusus (4-18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan. Selain peningkatan aksesibilitas, peningkatan mutu pelayanan pendidikan juga perlu dilakukan untuk mencapai outcome dalam melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing. Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi guru dan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan Standar Nasional yang menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata nilai hasil peserta didik UN SMA dan SMK di Jawa Barat apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Permasalahan ini tentunya tidak terlepas dari peran sekolah yang semestinya dapat membantu tenaga pendidik dan peserta didik agar mampu saling mendukung dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
- b. Meningkatnya mutu pendidikan
- c. Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dari indikator capaian, yaitu:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, SMK, dan SLB;
- b. Nilai Mutu Pendidikan SMA, SMK, dan SLB;
- c. Indeks kepuasan pelayanan pendidikan menengah serta pendidikan khusus dan layanan khusus.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk meningkatnya aksesibilitas pendidikan salah satunya dengan peningkatan daya tampung satuan pendidikan.
- b. Sasaran strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya dengan Pemberdayaan sekolah (sekolah juara, SMK juara, guru juara, budaya juara, PT juara) dan pemberdayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 s.d. 13 sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi
- c. Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) diantaranya meningkatnya SAKIP Dinas Pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang profesional, Monitoring & Evaluasi Pengendalian, Sistem Informasi Dinas Pendidikan pengelolaan sekolah juara, Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program yang tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 terdiri dari 6 Program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 9 kegiatan dan 22 Sub kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Pendidikan dengan 3 kegiatan dan 154 sub kegiatan;
- c. Program Pengembangan Kurikulum dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan;
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
- f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah

dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; dan
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang melayani Sub Wilayah Kota (SWK).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042, arahan struktur ruang dibagi menjadi 9 (sembilan) Sub Wilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun Alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Sumur Bandung, Lengkong, Regol, Astana

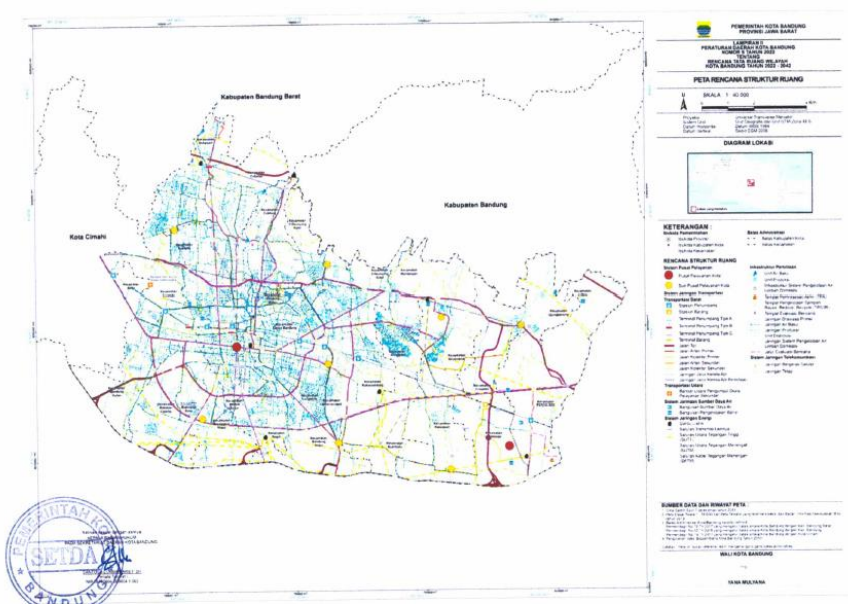
Anyar, Andir, dan Cicendo, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan

- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:



Gambar 3. 1. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 terdiri atas:

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

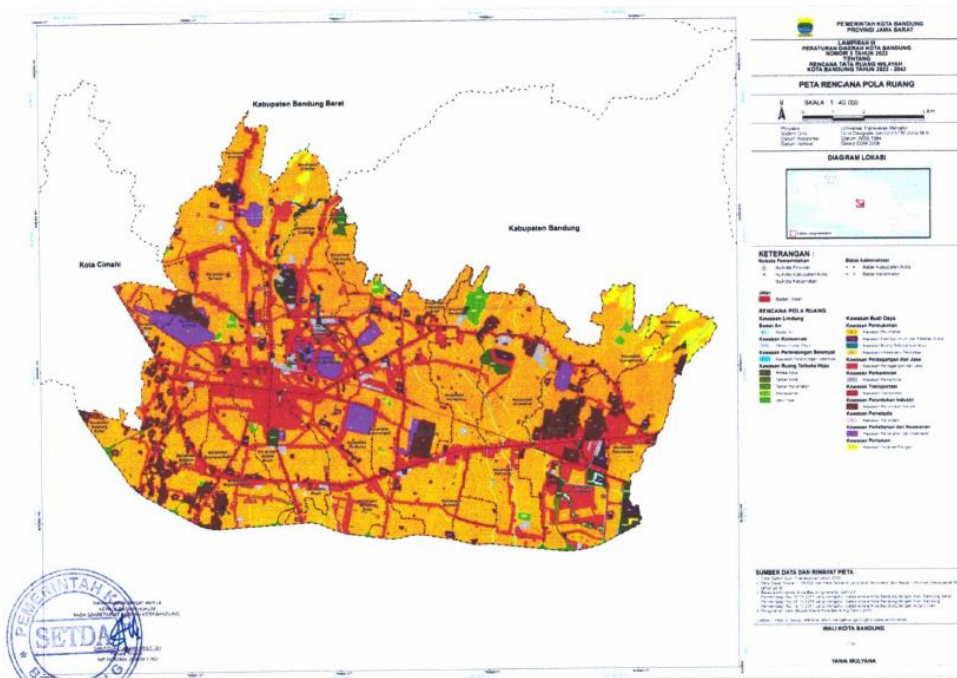
Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan badan air, kawasan

perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), dan kawasan konservasi. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. Menjaga keseimbangan kawasan badan air seluas lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan;
- b. Menjaga kawasan perlindungan setempat seluas lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hektar, yang meliputi kawasan sempadan sungai (meliputi sempadan sungai pada Sungai Cikapundung, Sungai Cikadu, Sungai Ciregol, Sungai Cidurian, Sungai Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo, dan Sungai Cipanjal), serta menjaga kawasan kearifan lokal berupa kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
- c. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- d. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- e. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- f. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain dalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- g. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektur;
- h. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, peruntukan industri, pariwisata, pertanian, transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. Mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. Mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. Mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. Membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. Mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. Menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.



Gambar 3. 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung

3.4. Isu-isu Strategis Kota Bandung

Hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan, telaahan terhadap isu dan kebijakan internasional, nasional dan provinsi, serta telaahan terhadap RPJPD dan RTRW Kota Bandung menghasilkan rumusan isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Tahun 2024-2026 terdiri atas 4 (empat) isu utama, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - a. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 - b. Peningkatan Kebugaran Fisik Masyarakat
 - c. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
 - d. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
 - e. Penerapan Pendidikan Bermutu
 - f. Peningkatan Budaya Baca
 - g. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - h. Penerapan Kampung Keluarga Berkualitas
 - i. Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih
 - a. Penerapan Manajemen Perubahan
 - b. Deregulasi Kebijakan

- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - d. Penataan Tatalaksana
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - f. Penguatan Akuntabilitas
 - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - h. Penguatan Pengawasan
3. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota
 - a. Peningkatan daya saing pariwisata
 - b. Pengembangan ekonomi kreatif
 - c. Peningkatan daya saing perdagangan dan perindustrian
 - d. Peningkatan penanaman modal
 - e. Peningkatan kualitas koperasi dan skala usaha mikro
 - f. Penanggulangan kemiskinan
 - g. Penurunan pengangguran
 4. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota
 - a. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Pendidikan.
 - b. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Kesehatan
 - c. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang
 - d. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan
 - e. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Transportasi
 - f. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas
 - g. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial
 - h. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, rinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Bandung telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya. Tujuan dinas pendidikan kota Bandung adalah “meningkatnya Pendidikan Masyarakat” dengan indikator tujuan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-Rata lama sekolah (RLS) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung

ISU	TUJUAN	SASARAN
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1. Pendidikan Bermutu
		2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
		3. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
		4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	▪ Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ▪ Angka Partisipasi Kasar (APK) SD ▪ Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP ▪ Angka Partisipasi Murni (APM) SD ▪ Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
3. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	▪ Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD ▪ Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP
4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap tahunnya. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3. Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
				2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	100	100	100	100	100	100	Persen	
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD	APK PAUD = (Siswa PAUD/ Penduduk usia PAUD) x 100%	85.94	85.95	85.96	85.97	85.98	85.98	Persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD	APK SD = (Siswa SD/ Penduduk usia SD) x 100%	102.50	102.51	102.52	102.53	102.54	102.54	Persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP	APK SMP = (Siswa SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	95.80	95.81	95.82	95.83	95.84	95.84	Persen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
				2022	2023	2024	2025	2026			
		Angka Partisipasi Murni (APM) – SD	APM SD = (Siswa usia SD/ Penduduk usia SD) x 100%	95.39	95.40	95.41	95.42	95.43	95.43	Persen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP	APM SMP = (Siswa usia SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	85.14	85.15	85.16	85.17	85.18	85.18	Persen	
	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	17.74	17.24	16.74	16.24	15.74	15.74	Persen	
		Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama	31.79	31.29	30.79	30.29	29.79	29.79	Persen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
				2022	2023	2024	2025	2026			
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	85,25	85,43	85,61	85,79	85,97	85,97	poin	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode itu.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres, Perda atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Dinas Pendidikan Kota Bandung 2024-2026.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kota Bandung, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, dan tujuan Pemerintah Kota Bandung disajikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan

Isu: Peningkatan Kualitas Pendidikan				
Indikator: Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Layanan Pengelolaan Pendidikan SD, SMP, Pendidikan Masyarakat, dan PAUD	- Mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar pada setiap satuan pendidikan - Mengembangkan Kurikulum Lokal dan mengimplementasikan kepada setiap satuan pendidikan - Penyusunan perencanaan program pada setiap satuan pendidikan - Pelaksanaan rencana kerja pada setiap satuan pendidikan - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pada setiap satuan pendidikan - Pembentukan kepemimpinan pendidikan yang berkompeten di bidangnya - Pengelolaan sistem informasi manajemen pada setiap satuan pendidikan - Meningkatkan jumlah sekolah dan guru penggerak secara berkala - Mengoptimalkan assessment center sebagai lembaga penjaminan mutu - Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal untuk diakreditasi

Isu: Peningkatan Kualitas Pendidikan				
Indikator: Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Angka Literasi dan Numerasi SD dan SMP	- Pelaksanaan pelatihan guru matematika dan non matematika - Peningkatan intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi dan numerasi dalam pembelajaran - Peningkatan jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek - Peningkatan jumlah pembelajaran non matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi - Menyediakan pojok belajar dan taman bacaan masyarakat di tingkat kelurahan
			Angka Kesiapan Sekolah	- Peningkatan pendataan literasi PAUD di Kota Bandung - Program Peningkatan Keterampilan Guru - Program Peningkatan Kualitas Bahan Bacaan - Program Pendampingan Orang Tua - Program Kelas Kreatif - Peningkatan kualitas lingkungan belajar
			Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Memberikan Bantuan Pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi

Isu: Peningkatan Kualitas Pendidikan				
Indikator: Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				- Workshop, Bimtek, Sosialisasi dan Kegiatan lainnya - Pelaksanaan supervisi dan evaluasi kinerja secara berkala - Meningkatkan kualifikasi guru pamong - Menambah jumlah guru pamong - Pelaksanaan pelatihan kepada guru - Mewadahi kegiatan KKG dan Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan - Tersedianya tenaga pendidik yang sesuai dengan rasio Standar Nasional Pendidikan (1:2) - Peningkatan Kualifikasi tenaga pendidik yang bersertifikat
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Mewujudkan aksesibilitas peserta didik PAUD Formal	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD - Melaksanakan pendataan satuan layanan pendidikan PAUD dan peserta didiknya - Penyediaan PTK Non ASN pada Jenjang PAUD
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Mewujudkan aksesibilitas peserta didik SD dan Paket A	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Sekolah Dasar - Mengupayakan pemanfaatan dan penempatan guru PPPK di Sekolah Dasar sesegera mungkin

Isu: Peningkatan Kualitas Pendidikan				
Indikator: Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				- Meningkatkan Pembinaan untuk Sekolah Dasar Swasta - Mengoptimalkan penggunaan gedung sekolah dasar untuk digunakan oleh pendidikan nonformal pada akhir minggu - Mengarahkan pembangunan sekolah-sekolah ke wilayah timur kota Bandung - Menyediakan fasilitas angkutan khusus bagi peserta didik - Menginisiasi learning management system pendidikan kota Bandung yang menyediakan sumber-sumber belajar digital (rintisan perpustakaan digital)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Mewujudkan aksesibilitas peserta didik SMP dan Paket B	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama - Mengupayakan pemanfaatan dan penempatan guru PPPK di Sekolah Menengah Pertama sesegera mungkin - Menginisiasi <i>learning management system</i> pendidikan kota Bandung yang menyediakan sumber-sumber belajar digital (rintisan perpustakaan digital)
	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	Persentase Anak Tidak Sekolah	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	- Pelaksanaan proyeksi jumlah satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik

Isu: Peningkatan Kualitas Pendidikan				
Indikator: Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				- Meningkatkan koordinasi dengan disdukcapil terkait penyediaan akta kelahiran bagi calon peserta didik yang bermasalah
			Intensifikasi pendataan anak tidak sekolah	- Melibatkan stakeholder untuk pendataan anak tidak sekolah
			Meningkatnya Jaminan Pendidikan	- Pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu - Merancang peraturan daerah untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah anak tidak sekolah
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan	- Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pendidikan - Meningkatkan sarana prasarana Dinas Pendidikan - Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kota Bandung.

Adapun program yang akan dilaksanakan terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penyajian Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1. Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat														
	Pendidikan Bermutu													
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
				Angka Kesiapan Sekolah	55,40 persen	56,00 persen	2.450.000.000,00	56,50 persen	3.000.000.000,00	57,00 persen	3.000.000.000,00	57,00 persen	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	50,00 persen	52,00 persen	2.370.000.000,00	54,00 persen	2.512.500.000,00	56,00 persen	2.690.625.000,00	56 persen	2.690.625.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	58.00 persen	60.00 persen	5.530.000.000,00	62.00 persen	5.862.500.000,00	64.00 persen	6.278.125.000,00	64.00 persen	6.278.125.000,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata kemampuan Literasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	2,05 poin	2,07 poin	972.500.000,00	2,09 poin	1.350.000.000,00	2,11 poin	1.350.000.000,00	2,11 poin	1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	2,00 poin	2,03 poin	1.337.500.000,00	2,05 poin	1.671.875.000,00	2,07 poin	2.089.843.750,00	2,07 poin	2.089.843.750,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2,07 poin	2,09 poin	1.225.000.000,00	2,11 poin	1.531.250.000,00	2,13 poin	1.914.062.500,00	2,13 poin	1.914.062.500,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Rata-rata kemampuan Numerasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	1,80 poin	1,82 poin	972.500.000,00	1,84 poin	1.350.000.000,00	1,86 poin	1.350.000.000,00	1,86 poin	1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,70 poin	1,72 poin	1.337.500.000,00	1,74 poin	1.671.875.000,00	1,76 poin	2.089.843.750,00	1,76 poin	2.089.843.750,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,85 poin	1,87 poin	1.225.000.000,00	1,89 poin	1.531.250.000,00	1,91 poin	1.914.062.500,00	1,91 poin	1.914.062.500,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
				Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.700.000.000,00	100 Persen	2.875.000.000,00	100 Persen	3.093.750.000,00	100 Persen	3.093.750.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	2.675.000.000,00	100 Persen	3.343.750.000,00	100 Persen	4.179.687.500,00	100 Persen	4.179.687.500,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.700.000.000,00	100 Persen	2.875.000.000,00	100 Persen	3.093.750.000,00	100 Persen	3.093.750.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	2.450.000.000,00	100 Persen	3.062.500.000,00	100 Persen	3.828.125.000,00	100 Persen	3.828.125.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
				Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100 Persen	100 Persen	2.500.000.000,00	100 Persen	2.625.000.000,00	100 Persen	2.781.250.000,00	100 Persen	2.781.250.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	2.450.000.000,00	100 Persen	3.000.000.000,00	100 Persen	3.000.000.000,00	100 Persen	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	1.945.000.000,00	100 Persen	2.700.000.000,00	100 Persen	2.700.000.000,00	100 Persen	2.700.000.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal	86,00 persen	87,00 persen	75.000.000,00	88,00 persen	100.000.000,00	89,00 persen	100.000.000,00	89,00 persen	0,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	86,00 persen	87,00 persen	125.000.000,00	88,00 persen	200.000.000,00	89,00 persen	200.000.000,00	89,00 persen	0,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100 persen	100 persen	300.000.000,00	100 persen	375.000.000,00	100 persen	468.750.000,00	100 persen	0,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100 persen	100 persen	400.000.000,00	100 persen	500.000.000,00	100 persen	625.000.000,00	100 persen	0,00	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
				Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar yang disusun	2 Dokumen	2 Dokum en	300.000.000,00	2 Dokum en	375.000.000,00	2 Dokum en	468.750.000,00	6 Dokum en	0,00	Dinas Pendidikan
				Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah Pertama yang disusun	2 Dokumen	2 Dokum en	400.000.000,00	2 Dokum en	500.000.000,00	2 Dokum en	625.000.000,00	6 Dokum en	0,00	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
				Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Non Formal yang disusun	2 Dokumen	2 Dokum en	125.000.000,00	2 Dokum en	200.000.000,00	2 Dokum en	200.000.000,00	6 Dokum en	0,00	Dinas Pendidikan
				Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokum en	75.000.000,00	2 Dokum en	100.000.000,00	2 Dokum en	100.000.000,00	6 Dokum en	0,00	Dinas Pendidikan
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Lainnya	100 persen	100 persen	52.500.000,00	100 persen	52.500.000,00	100 persen	52.500.000,00	100 persen	52.500.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	100 persen	100 persen	22.500.000,00	100 persen	22.500.000,00	100 persen	22.500.000,00	100 persen	22.500.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Lainnya	35,00 persen	50,00 persen	52.500.000,00	75,00 persen	52.500.000,00	100 persen	52.500.000,00	100 persen	52.500.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik	35,00 persen	50,00 persen	122.500.000,00	75,00 persen	122.500.000,00	100 persen	122.500.000,00	100 persen	122.500.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
				Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	6 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Dokumen Pemetaan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	2 Dokumen	125.000.000,00	6 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan													
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
				Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun secara lengkap	2 unit	2 unit	20.000.000.000,00	2 unit	60.000.000.000,00	2 unit	60.000.000.000,00	8 unit	60.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Pendaftar PAUD yang terlayani	100 persen	100 persen	30.137.800.000,00	100 persen	31.347.800.000,00	100 persen	31.347.800.000,00	100 persen	31.347.800.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Pendaftar Pendidikan Kesetaraan yang terlayani	100 persen	100 persen	2.360.000.000,00	100 persen	2.520.000.000,00	100 persen	2.520.000.000,00	100 persen	2.520.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Rasio Penduduk Usia SD Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	30,74 rasio	30,70 rasio	97.507.600.000,00	30,66 rasio	104.820.100.000,00	30,63 rasio	106.460.725.000,00	30,63 rasio	106.460.725.000,00	Dinas Pendidikan
				Rasio Penduduk Usia SMP Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	34,34 persen	34,25 persen	87.493.600.000,00	34,16 persen	96.368.600.000,00	34,06 persen	107.462.350.000,00	34,06 persen	107.462.350.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Dasar sesuai standar	100 Persen	100 Persen	64.257.600.000,00	100 Persen	64.257.600.000,00	100 Persen	64.257.600.000,00	100 Persen	64.257.600.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar	83 Persen	85 Persen	33.250.000.000,00	87 Persen	40.562.500.000,00	89 Persen	42.203.125.000,00	89 Persen	42.203.125.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
				Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Menengah Pertama sesuai standar	100 Persen	100 Persen	51.993.600.000,00	100 Persen	51.993.600.000,00	100 Persen	51.993.600.000,00	100 Persen	51.993.600.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar	75 Persen	77 Persen	55.500.000.000,00	79 Persen	104.375.000.000,00	81 Persen	115.468.750.000,00	81 Persen	115.468.750.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
				Persentase Ketersediaan Pendidik PAUD Formal sesuai standar	100 Persen	100 Persen	22.222.800.000,00	100 Persen	22.222.800.000,00	100 Persen	22.222.800.000,00	100 Persen	22.222.800.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan PAUD Formal yang Memenuhi Standar	80 Persen	82 Persen	7.915.000.000,00	84 Persen	9.125.000.000,00	86 Persen	9.125.000.000,00	86 Persen	9.125.000.000,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
				Persentase Ketersediaan Tutor Non Formal/Kesetaraan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	720.000.000,00	100 Persen	720.000.000,00	100 Persen	720.000.000,00	100 Persen	720.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal/ kesetaraan yang Memenuhi Standar	70 Persen	72 Persen	1.640.000.000,00	74 Persen	1.800.000.000,00	76 Persen	1.800.000.000,00	78 Persen	1.800.000.000,00	Dinas Pendidikan
Berkurangnya Anak Tidak Sekolah														
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
				Persentase Anak Tidak Sekolah yang terlayani sesuai standar	15 persen	30 persen	82.887.650.400,00	45 persen	83.412.650.400,00	60 persen	83.812.650.400,00	60 persen	83.812.650.400,00	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
				Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan informasi pendidikan	263 Satuan Pendidikan	263 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	263 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	263 Satuan Pendidikan	875.000.000,00	263 Satuan Pendidikan	875.000.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100 Persen	100 Persen	45.332.092.900,00	100 Persen	45.332.092.900,00	100 Persen	45.332.092.900,00	100 Persen	45.332.092.900,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Peserta Didik RMP yang diberi bantuan pendidikan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
				Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan informasi pendidikan	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	75 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	75 Satuan Pendidikan	625.000.000,00	75 Satuan Pendidikan	625.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100 Persen	100 Persen	35.493.457.500,00	100 Persen	35.493.457.500,00	100 Persen	35.493.457.500,00	100 Persen	35.493.457.500,00	Dinas Pendidikan
				Persentase Peserta Didik RMP yang diberi bantuan pendidikan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
				Jumlah Penilik dan Pamong yang memberikan informasi pendidikan	70 Orang	70 Orang	700.000.000,00	70 Orang	800.000.000,00	70 Orang	900.000.000,00	70 Orang	900.000.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Satuan Pendidikan yang memberikan informasi pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan		4 Satuan Pendidikan		4 Satuan Pendidikan		4 Satuan Pendidikan		Dinas Pendidikan
				Persentase Peserta Didik RMP yang diberi bantuan pendidikan	100 Persen	100 Persen	512.100.000,00	100 Persen	512.100.000,00	100 Persen	512.100.000,00	100 Persen	512.100.000,00	Dinas Pendidikan
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel														
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	762.336.192.192,00	100 Persen	909.057.386.941,00	100 Persen	1.086.008.864.329,00	100 Persen	1.086.008.864.329,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	15 Dokumen	15 Dokumen	1.350.000.000,00	15 Dokumen	1.350.000.000,00	15 Dokumen	1.350.000.000,00	15 Dokumen	1.350.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Persentase pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	737.447.822.451,00	100 Persen	884.957.386.941,00	100 Persen	1.061.908.864.329,00	100 Persen	1.061.908.864.329,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	4 Laporan	350.000.000,00	4 Laporan	350.000.000,00	4 Laporan	350.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1 Laporan	1.750.000.000,00	1 Laporan	1.750.000.000,00	1 Laporan	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.950.000.000,00	100 Persen	8.400.000.000,00	100 Persen	8.400.000.000,00	100 Persen	8.400.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.750.000.000,00	100 Persen	2.000.000.000,00	100 Persen	2.000.000.000,00	100 Persen	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.800.000.000,00	100 Persen	6.000.000.000,00	100 Persen	6.000.000.000,00	100 Persen	6.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Pemeliharaan	100 Persen	100 Persen	4.188.369.742,00	100 Persen	4.250.000.000,00	100 Persen	4.250.000.000,00	100 Persen	4.250.000.000,00	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Tabel 6. 2 Kerangka Pendanaan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pendidikan Bermutu														
	1.01.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2000 Peserta Didik	4000 Peserta Didik	1.000.000.000	4000 Peserta Didik	1.500.000.000	4000 Peserta Didik	1.500.000.000	4000 Peserta Didik	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	27 Satuan Pendidi kan	150.000.000	27 Satuan Pendidi kan	150.000.000	27 Satuan Pendidikan	150.000.000	27 Satuan Pendidik an	150.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidi kan	500.000.000	5 Satuan Pendidi kan	500.000.000	5 Satuan Pendidikan	500.000.000	5 Satuan Pendidik an	500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1250 Orang	1250 Orang	450.000.000	1250 Orang	450.000.000	1250 Orang	450.000.000	1250 Orang	450.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3 Dokum en	250.000.000	3 Dokum en	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	925 Orang	1425 Orang	2.000.000.000	1425 Orang	2.000.000.000	1425 Orang	2.000.000.000	1425 Orang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1750 Orang	1400 Orang	500.000.000	1400 Orang	625.000.000	1400 Orang	781.250.000	1400 Orang	781.250.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keset araan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	327 Peserta Didik	750 Peserta Didik	1.000.000.000	750 Peserta Didik	1.500.000.000	750 Peserta Didik	1.500.000.000	750 Peserta Didik	1.500.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	78 Satuan Pendidikan	78 Satuan Pendidi kan	200.000.000	78 Satuan Pendidi kan	300.000.000	78 Satuan Pendidikan	300.000.000	78 Satuan Pendidik an	300.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keset araan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidi kan	400.000.000	100 Satuan Pendidi kan	400.000.000	100 Satuan Pendidikan	400.000.000	100 Satuan Pendidik an	400.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keset araan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	140 Orang	140 Orang	175.000.000	140 Orang	250.000.000	140 Orang	250.000.000	140 Orang	250.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Keset araan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	1 Satuan Pendidikan	78 Satuan Pendidi kan	170.000.000	78 Satuan Pendidi kan	250.000.000	78 Satuan Pendidikan	250.000.000	78 Satuan Pendidik an	250.000.000	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	426 Satuan Pendidikan	435 Satuan Pendidi kan	400.000.000	435 Satuan Pendidi kan	500.000.000	435 Satuan Pendidikan	625.000.000	435 Satuan Pendidik an	625.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	274 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidi kan	225.000.000	272 Satuan Pendidi kan	281.250.000	272 Satuan Pendidikan	351.562.500	272 Satuan Pendidik an	351.562.500	Dinas Pendidikan	

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	850.000.000	1500 Peserta Didik	1.062.500.000	1500 Peserta Didik	1.328.125.000	1500 Peserta Didik	1.328.125.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	274 Satuan Pendidikan	520 Satuan Pendidikan	550.000.000	520 Satuan Pendidikan	687.500.000	520 Satuan Pendidikan	859.375.000	520 Satuan Pendidikan	859.375.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	426 Orang	460 Orang	300.000.000	460 Orang	375.000.000	460 Orang	468.750.000	460 Orang	468.750.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	36 Konten Digital	200.000.000	36 Konten Digital	250.000.000	36 Konten Digital	312.500.000	36 Konten Digital	312.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	187.500.000	2 Dokumen	234.375.000	2 Dokumen	234.375.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1650 Orang	2.000.000.000	1650 Orang	2.000.000.000	1650 Orang	2.000.000.000	1650 Orang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang	600 Orang	200.000.000	600 Orang	250.000.000	600 Orang	312.500.000	600 Orang	312.500.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	2290 Orang	1800 Orang	500.000.000	1800 Orang	625.000.000	1800 Orang	781.250.000	1800 Orang	781.250.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	97489 Peserta Didik	264 Peserta Didik	350.000.000	264 Peserta Didik	437.500.000	264 Peserta Didik	546.875.000	264 Peserta Didik	546.875.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	264 Satuan Pendidikan	264 Satuan Pendidikan	200.000.000	264 Satuan Pendidikan	250.000.000	264 Satuan Pendidikan	312.500.000	264 Satuan Pendidikan	312.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2199 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	700.000.000	2300 Peserta Didik	875.000.000	2300 Peserta Didik	1.093.750.000	2300 Peserta Didik	1.093.750.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	264 Satuan Pendidikan	264 Satuan Pendidikan	600.000.000	264 Satuan Pendidikan	750.000.000	264 Satuan Pendidikan	937.500.000	264 Satuan Pendidikan	937.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	234 Orang	250.000.000	234 Orang	312.500.000	234 Orang	390.625.000	234 Orang	390.625.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	234 Orang	22 Konten Digital	200.000.000	22 Konten Digital	250.000.000	22 Konten Digital	312.500.000	22 Konten Digital	312.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	187.500.000	1 Dokumen	234.375.000	1 Dokumen	234.375.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	1400 Orang	2.000.000.000	1400 Orang	2.000.000.000	1400 Orang	2.000.000.000	1400 Orang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	200.000.000	200 Orang	250.000.000	200 Orang	312.500.000	200 Orang	312.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1700 Orang	1200 Orang	500.000.000	1200 Orang	625.000.000	1200 Orang	781.250.000	1200 Orang	781.250.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
		1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal												
		1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokum en	75.000.000	2 Dokum en	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokum en	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokum en	75.000.000	2 Dokum en	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokum en	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	2 Buku	50.000.000	2 Buku	100.000.000	2 Buku	100.000.000	2 Buku	100.000.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
		1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokum en	150.000.000	2 Dokum en	187.500.000	2 Dokumen	234.375.000	2 Dokumen	234.375.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	187.500.000	1 Dokumen	234.375.000	1 Dokumen	234.375.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokumen	312.500.000	1 Dokumen	312.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	1 Dokum en	200.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokumen	312.500.000	1 Dokumen	312.500.000	Dinas Pendidikan
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	2 Dokum en	250.000.000	2 Dokum en	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan														
	1.01.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-	1 Unit	6.500.000.000	1 Unit	6.500.000.000	1 Unit	6.500.000.000	1 Unit	6.500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	4 Unit	500.000.000	4 Unit	1.000.000.000	4 Unit	1.000.000.000	4 Unit	1.000.000.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	4 Unit	150.000.000	4 Unit	250.000.000	4 Unit	250.000.000	4 Unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket	4 Paket	50.000.000	4 Paket	150.000.000	4 Paket	150.000.000	4 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	4 Paket	15.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 Paket	4 Paket	500.000.000	4 Paket	1.000.000.000	4 Paket	1.000.000.000	4 Paket	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	8 Paket	100.000.000	8 Paket	150.000.000	8 Paket	150.000.000	8 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	4440 Orang	3968 Orang	22.222.800.000	3968 Orang	22.222.800.000	3968 Orang	22.222.800.000	3968 Orang	22.222.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
		1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keset araan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	7 Unit	50.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	4 Unit	50.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	1 Paket	40.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	30 Orang	720.000.000	30 Orang	720.000.000	30 Orang	720.000.000	30 Orang	720.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	10 Ruang	5.000.000.000	10 Ruang	10.000.000.000	10 Ruang	10.000.000.000	10 Ruang	10.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	30 Unit	4.000.000.000	30 Unit	5.000.000.000	30 Unit	5.000.000.000	30 Unit	5.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	50 Ruang	19.000.000.000	50 Ruang	19.000.000.000	50 Ruang	19.000.000.000	50 Ruang	19.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	40 Unit	2.500.000.000	40 Unit	3.125.000.000	40 Unit	3.906.250.000	40 Unit	3.906.250.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	1.500.000.000	2 Paket	1.875.000.000	2 Paket	2.343.750.000	2 Paket	2.343.750.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	2 Paket	1.250.000.000	2 Paket	1.562.500.000	2 Paket	1.953.125.000	2 Paket	1.953.125.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3495 Orang	4923 Orang	64.257.600.000	4923 Orang	64.257.600.000	4923 Orang	64.257.600.000	4923 Orang	64.257.600.000	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	20.000.000.000	2 Unit	60.000.000.000	2 Unit	60.000.000.000	2 Unit	60.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	56 Ruang	20 Ruang	10.000.000.000	20 Ruang	12.500.000.000	20 Ruang	15.625.000.000	20 Ruang	15.625.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	4 Ruang	2.000.000.000	4 Ruang	2.500.000.000	4 Ruang	3.125.000.000	4 Ruang	3.125.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	4 Ruang	2.000.000.000	4 Ruang	2.500.000.000	4 Ruang	3.125.000.000	4 Ruang	3.125.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	1.000.000.000	1 Ruang	1.250.000.000	1 Ruang	1.562.500.000	1 Ruang	1.562.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	4 Unit	500.000.000	4 Unit	625.000.000	4 Unit	781.250.000	4 Unit	781.250.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Unit	1.000.000.000	3 Unit	1.250.000.000	3 Unit	1.562.500.000	3 Unit	1.562.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	12 Unit	5.000.000.000	12 Unit	6.250.000.000	12 Unit	7.812.500.000	12 Unit	7.812.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	20 Ruang	10.000.000.000	20 Ruang	12.500.000.000	20 Ruang	15.625.000.000	20 Ruang	15.625.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	2.000.000.000	6 Paket	2.500.000.000	6 Paket	3.125.000.000	6 Paket	3.125.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	3 Paket	1.000.000.000	3 Paket	1.250.000.000	3 Paket	1.562.500.000	3 Paket	1.562.500.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	4 Paket	1.000.000.000	4 Paket	1.250.000.000	4 Paket	1.562.500.000	4 Paket	1.562.500.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3305 Orang	3743 Orang	51.993.600.000	3743 Orang	51.993.600.000	3743 Orang	51.993.600.000	3743 Orang	51.993.600.000	Dinas Pendidikan
Berkurangnya Anak Tidak Sekolah														
	1.01.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket	8 Paket	425.000.000	8 Paket	500.000.000	8 Paket	500.000.000	8 Paket	500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	134 Peserta Didik	87.100.000	134 Peserta Didik	87.100.000	134 Peserta Didik	87.100.000	134 Peserta Didik	87.100.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	4 Dokum en	700.000.000	4 Dokum en	800.000.000	4 Dokumen	900.000.000	4 Dokumen	900.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	44616 Unit	68112 Unit	36.950.760.000	4923 Orang	36.950.760.000	4923 Orang	36.950.760.000	4923 Orang	36.950.760.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8076 Peserta Didik	8015 Peserta Didik	8.381.332.900	8015 Peserta Didik	8.381.332.900	8015 Peserta Didik	8.381.332.900	8015 Peserta Didik	8.381.332.900	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokum en	500.000.000	2 Dokum en	700.000.000	2 Dokumen	875.000.000	2 Dokumen	875.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	27820 Paket	35233 Paket	20.347.057.500	4 Paket	20.347.057.500	4 Paket	20.347.057.500	4 Paket	20.347.057.500	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11662 Peserta Didik	12622 Peserta Didik	15.146.400.000	3743 Orang	15.146.400.000	3743 Orang	15.146.400.000	3743 Orang	15.146.400.000	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokum en	350.000.000	1 Dokum en	500.000.000	1 Dokumen	625.000.000	1 Dokumen	625.000.000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokum en	1.000.000.000	3 Dokum en	1.000.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8 Lapora n	100.000.000	8 Lapora n	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Lapora n	250.000.000	4 Lapora n	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9000 Orang/bulan	9000 Orang/ bulan	737.297.822.45 1	9000 Orang/ bulan	884.757.386.94 1	9000 Orang/bula n	1.061.708.864.32 9	9000 Orang/bu lan	1.061.708.864.3 29	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	4 Laporan	4 Lapora n	150.000.000	4 Lapora n	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	200.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
		1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Lapora n	250.000.000	4 Lapora n	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4 Dokum en	100.000.000	4 Dokum en	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	4 Dokum en	100.000.000	4 Dokum en	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 Orang	240 Orang	500.000.000	240 Orang	500.000.000	240 Orang	500.000.000	240 Orang	500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	500 Orang	500 Orang	400.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	400 Orang	200.000.000	400 Orang	300.000.000	400 Orang	300.000.000	400 Orang	300.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.250.000.000	5 Paket	1.500.000.000	5 Paket	1.500.000.000	5 Paket	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	500.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	250.000.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	250.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokum en	100.000.000	4 Dokum en	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Lapora n	250.000.000	2 Lapora n	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Lapora n	600.000.000	12 Lapora n	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	4 Dokum en	4.900.000.000	4 Dokum en	5.000.000.000	4 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	5.000.000.000	Dinas Pendidikan

Sasaran	Program/ Kegiatan	Kode	Sub Kegiatan Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	3.750.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	1.300.000.000	12 Lapora n	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	4.500.000.000	12 Lapora n	4.500.000.000	12 Laporan	4.500.000.000	12 Laporan	4.500.000.000	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	117 Unit	2.000.000.000	117 Unit	2.000.000.000	117 Unit	2.000.000.000	117 Unit	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	1.750.000.000	3 Unit	1.750.000.000	3 Unit	1.750.000.000	3 Unit	1.750.000.000	Dinas Pendidikan
		1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	438.369.742	30 Unit	500.000.000	30 Unit	500.000.000	30 Unit	500.000.000	Dinas Pendidikan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 Pemerintah Kota Bandung.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis perubahan. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga perlu bagi publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Per Tahun (Kosongkan)					Target Akhir Renstra	Satuan
		2022	2023	2024	2025	2026	2026		
1	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100	100	100	100	persen	
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,94	85,95	85,96	85,97	85,98	85,98	persen	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	102,50	102,51	102,52	102,53	102,54	102,54	persen	
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,80	95,81	95,82	95,83	95,84	95,84	persen	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,39	95,40	95,41	95,42	95,43	95,43	persen	
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,18	persen	
8	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	17,74	17,24	16,74	16,24	15,74	15,74	persen	
9	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	31,79	31,29	30,79	30,29	29,79	29,79	persen	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	85,43	85,61	85,79	85,97	85,97	indeks	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Dinas Pendidikan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2024-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Eselon II, III, IV, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Sekolah dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama tiga tahun mendatang.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2024-2026, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Bandung khususnya, dan Pendidikan Nasional umumnya, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing secara global.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung, 40113
Web. www.disdik.bandung.go.id E-mail. disdik@bandung.go.id

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026

Nomor : PN.03.03/12037 – DISDIK / XI /2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami Tim Reviu Dinas Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor: KP.10.01/11982-DISDIK/XI/2024 telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dengan rincian hasil sebagai berikut:

I. ISU

a. Uraian ISU Sebelum dan setelah Reviu

ISU
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang ISU

Tidak ada perubahan

c. Uraian ISU Setelah Reviu

ISU (Setelah Reviu)
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

II. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

ISU	TUJUAN
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

Tidak ada perubahan

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (setelah reviu)
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

III. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

ISU	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1. Pendidikan Bermutu
		2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
		3. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
		4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

Tidak ada perubahan

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (setelah reviu)
1. Pendidikan Bermutu
2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
3. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

IV. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Tidak ada perubahan

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-Rata Lama Sekolah

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
2. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan	- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - Angka Partisipasi Murni (APM) SD - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
3. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	- Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD - Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP
4. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

Tidak ada perubahan

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
1. Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	1. Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP	4. Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP
5. Angka Partisipasi Murni (APM) – SD	5. Angka Partisipasi Murni (APM) – SD
6. Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP	6. Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP
7. Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	7. Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD
8. Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	8. Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP
9. Indeks Kepuasan Masyarakat	9. Indeks Kepuasan Masyarakat

VI. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja	Alasan (Sebelum Reviu)	Cara Pengukuran (Sebelum Reviu)	Keterangan / Kriteria (Sebelum Reviu)
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelulusan siswa.	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	Pendidikan Bermutu
Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan	APK PAUD = (Siswa PAUD/ Penduduk usia PAUD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD		APK SD = (Siswa SD/ Penduduk usia SD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP		APK SMP = (Siswa SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Indikator Kinerja	Alasan (Sebelum Reviu)	Cara Pengukuran (Sebelum Reviu)	Keterangan / Kriteria (Sebelum Reviu)
Angka Partisipasi Murni (APM) – SD	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan	APM SD = (Siswa usia SD/ Penduduk usia SD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP	kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh	APM SMP = (Siswa usia SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	Indikator ini dipilih untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah di Kota Bandung	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP		Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja	Alasan (Sebelum Reviu)	Cara Pengukuran (Sebelum Reviu)	Keterangan / Kriteria (Sebelum Reviu)
		= Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi PerUnsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	

b. Rekomendasi Tim Reviu /Narasumber tentang Formulasi IKS

Tidak ada perubahan

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja	Alasan (Setelah Reviu)	Cara Pengukuran (Setelah Reviu)	Keterangan / Kriteria (Setelah Reviu)
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesenjangan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelulusan siswa.	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	Pendidikan Bermutu
Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan	APK PAUD = (Siswa PAUD/ Penduduk usia PAUD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD		APK SD = (Siswa SD/ Penduduk usia SD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP		APK SMP = (Siswa SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Indikator Kinerja	Alasan (Setelah Reviu)	Cara Pengukuran (Setelah Reviu)	Keterangan / Kriteria (Setelah Reviu)
Angka Partisipasi Murni (APM) – SD	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh	APM SD = (Siswa usia SD/ Penduduk usia SD) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP		APM SMP = (Siswa usia SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	Indikator ini dipilih untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah di Kota Bandung	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP		Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja	Alasan (Setelah Reviu)	Cara Pengukuran (Setelah Reviu)	Keterangan / Kriteria (Setelah Reviu)
		Bobot/ Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi PerUnsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	

VII. TARGET KINERJA IKS DAN IKU

a. Rincian Target Indikator Sasaran Kota (IKS) Sebelum Reviu

No	Sasaran Strategis RPD	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,00	11,03	11,06	11,11	11,17	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran RPD (IKS)

Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2023 adalah 11,06 Tahun, sehingga Target RLS pada tahun 2024 sudah tercapai dan harus diubah

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS) Setelah Reviu

No	Sasaran Strategis RPD	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,00	11,03	11,07	11,11	11,17	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	

d. Rincian Target Indikator Kinerja (IKU) Sebelum Reviu

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	78,63	85,94	85,95	85,96	85,97	85,98
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	persen	103,70	102,50	102,51	102,52	102,53	102,54
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	persen	88,78	95,80	95,81	95,82	95,83	95,84
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat	persen	98,11	95,39	95,40	95,41	95,42	95,43
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat	persen	71,20	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18
3	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	persen	N/A	17,74	17,24	16,74	16,24	15,74
		Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	persen	N/A	31,79	31,29	30,79	30,29	29,79
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85,07	85,25	85,43	85,61	85,79	85,97

e. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja IKU

1. Realisasi Indikator Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD TW 3 Tahun 2024 sebesar 2,11, sehingga perlu dilakukan perubahan target untuk tahun 2025 dan 2026
2. Realisasi Indikator Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP TW 3 Tahun 2024 sebesar 5,18 sehingga perlu dilakukan perubahan target untuk tahun 2025 dan 2026
3. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 85,71 dilakukan perubahan target untuk tahun 2024, 2025 dan 2026

f. Rincian Target Indikator Kinerja (IKU) Setelah Reviu

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	78,63	85,94	85,95	85,96	85,97	85,98
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	persen	103,70	102,50	102,51	102,52	102,53	102,54
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	persen	88,78	95,80	95,81	95,82	95,83	95,84
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat	persen	98,11	95,39	95,40	95,41	95,42	95,43
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat	persen	71,20	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18
3	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	persen	N/A	17,74	17,24	16,74	2,10	2,09

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	persen	N/A	31,79	31,29	30,79	5,17	5,16
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85,07	85,25	85,43	87,40	87,60	87,90

VIII. TARGET KINERJA PROGRAM

a. Rincian Target Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	58,00	60,00	62,00	64,00
		Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	1,88	1,94	2,00	2,03	2,05	2,07
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	1,69	1,69	1,70	1,72	1,74	1,76
		Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11	2,13
		Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	1,83	1,83	1,85	1,87	1,89	1,91
		Angka Kesiapan Sekolah	Persen	N/A	N/A	55,40	56,00	56,50	57,00

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rata-rata kemampuan Literasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11
		Rata-rata kemampuan Numerasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Persentase Pendaftar PAUD yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pendaftar Pendidikan Kesetaraan yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SD	Rasio Penduduk Usia SD Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Rasio	30,99	30,78	30,74	30,70	30,66	30,63
6	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SMP	Rasio Penduduk Usia SMP Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Persen	34,46	34,63	34,34	34,25	34,16	34,06
		Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun secara lengkap	Unit	2	2	2	2	2	2

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Persentase Anak Tidak Sekolah yang terlayani sesuai standar	Persen	N/A	N/A	15	30	45	60
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	N/A	N/A	82,20	83,00	86,11	86,12

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Program

Berdasarkan Rapor Pendidikan dan SE Kemdikbud Nomor : 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Indikator Rata-Rata Literasi dan Numerasi diubah satuannya dari Poin menjadi Skor, sehingga perlu dilakukan perubahan satuan indikator beserta targetnya.

c. Rincian Target Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	58,00	60,00	62,00	64,00

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	65,72	71,50	72,16	72,76

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	46,32	52,72	54,08	55,24
		Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	76,38	80,01	83,21	83,36
		Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	75,65	75,65	77,36	77,61
		Angka Kesiapan Sekolah	Persen	N/A	N/A	55,40	56,00	56,50	57,00
		Rata-rata kemampuan Literasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11
		Rata-rata kemampuan Numerasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Persentase Pendaftar PAUD yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pendaftar Pendidikan Kesetaraan yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SD	Rasio Penduduk Usia SD Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Rasio	30,99	30,78	30,74	30,70	30,66	30,63
6	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SMP	Rasio Penduduk Usia SMP Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Persen	34,46	34,63	34,34	34,25	34,16	34,06
		Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun secara lengkap	Unit	2	2	2	2	2	2
7	Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Persentase Anak Tidak Sekolah yang terlayani sesuai standar	Persen	N/A	N/A	15	30	45	60
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	N/A	N/A	82,20	83,00	86,11	86,12

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Pendidikan Hasil Reviu Tahun 2024**, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
				2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Pendidikan Bermutu	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	100	100	100	100	100	100	Persen	
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) – PAUD	APK PAUD = (Siswa PAUD/ Penduduk usia PAUD) x 100%	85.94	85.95	85.96	85.97	85.98	85.98	Persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) – SD	APK SD = (Siswa SD/ Penduduk usia SD) x 100%	102.50	102.51	102.52	102.53	102.54	102.54	Persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) – SMP	APK SMP = (Siswa SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	95.80	95.81	95.82	95.83	95.84	95.84	Persen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) – SD	APM SD = (Siswa usia SD/ Penduduk usia SD) x 100%	95.39	95.40	95.41	95.42	95.43	95.43	Persen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) – SMP	APM SMP = (Siswa usia SMP/ Penduduk usia SMP) x 100%	85.14	85.15	85.16	85.17	85.18	85.18	Persen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Target Akhir Renstra	Satuan
				2022	2023	2024	2025	2026			
	Berkurangnya Anak Tidak Sekolah	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SD	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	17,74	17,24	16,74	2,10	2,09	2,09	Persen	
		Persentase Anak Tidak Sekolah Usia SMP	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama yang tidak bersekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama	31,79	31,29	30,79	5,17	5,16	5,16	Persen	
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	85,25	85,43	87,40	87,60	87,90	87,90	poin	

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	58,00	60,00	62,00	64,00
		Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	75,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Lainnya	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	65,72	71,50	72,16	72,76
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	46,32	52,72	54,08	55,24
		Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	76,38	80,01	83,21	83,36
		Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	N/A	N/A	75,65	75,65	77,36	77,61
		Angka Kesiapan Sekolah	Persen	N/A	N/A	55,40	56,00	56,50	57,00
		Rata-rata kemampuan Literasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rata-rata kemampuan Numerasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	Poin	N/A	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	85	86	87	88	89
		Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa PAUD Formal	Persentase Pendaftar PAUD yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pendaftar Pendidikan Kesetaraan yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SD	Rasio Penduduk Usia SD Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Rasio	30,99	30,78	30,74	30,70	30,66	30,63
6	Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SMP	Rasio Penduduk Usia SMP Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	Persen	34,46	34,63	34,34	34,25	34,16	34,06
		Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun secara lengkap	Unit	2	2	2	2	2	2

No	Sasaran Program	Indikator Kebijakan	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Persentase Anak Tidak Sekolah yang terlayani sesuai standar	Persen	N/A	N/A	15	30	45	60
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin	N/A	N/A	82,20	83,00	86,11	86,12

Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan 2024
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100
Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2
	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2
Meningkatnya Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100
Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD yang disusun	2
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Non Formal yang disusun	2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan 2024
Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar yang disusun	2
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah Pertama yang disusun	2
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan PAUD Formal yang Memenuhi Standar	82
	Persentase Ketersediaan Pendidik PAUD Formal sesuai standar	100
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang Memenuhi Standar	72
	Persentase Ketersediaan Tutor Non Formal/Kesetaraan sesuai standar	100
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar	83
	Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Dasar sesuai standar	100
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar	77
	Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Menengah Pertama sesuai standar	100
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pendidikan	Jumlah Penilik dan Pamong yang memberikan informasi pendidikan	70
	Jumlah Satuan Pendidikan TK yang memberikan informasi pendidikan	4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan 2024
	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memberikan informasi pendidikan	263
	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memberikan informasi pendidikan	75
Pemberian Bantuan Pendidikan	Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100
	Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100
	Persentase Peserta Didik SMP RMP yang diberi bantuan pendidikan	100
	t	100
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	15
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan 2024
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
DINAS PENDIDIKAN				
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendaftar PAUD yang terlayani	100,00	100,00	Persen
	Persentase Pendaftar Pendidikan Kesetaraan yang terlayani	100,00	100,00	Persen
	Rasio Penduduk Usia SD Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	30,70	30,70	rasio
	Rasio Penduduk Usia SMP Terhadap Ketersediaan Rombongan Belajar	34,25	34,25	rasio
	Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun secara lengkap	2,00	2,00	unit
	Persentase Anak Tidak Sekolah yang terlayani sesuai standar	30,00	30,00	Persen
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	2,03	2,03	Poin
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1.72	1,72	Poin
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2.09	2,09	Poin

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.87	1,87	Poin
	Angka Kesiapan Sekolah	56,00	56,00	Persen
	Rata-rata kemampuan Literasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	2,07	2,07	Poin
	Rata-rata kemampuan Numerasi Kesetaraan berdasarkan Asesmen Nasional	1,82	1,82	Poin
	Persentase Tenaga Pendidik yang Kompeten	60,00	60,00	Persen
	Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Kompeten	52,00	52,00	Persen
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan PAUD Formal yang Memenuhi Standar	80	80	Persen
	Persentase Ketersediaan Pendidik PAUD Formal sesuai standar	100	100	Persen
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100	100	Persen
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100	100	Persen
	Jumlah Penilik dan Pamong yang memberikan informasi pendidikan	70	70	Orang
	Jumlah Satuan Pendidikan TK yang memberikan informasi pendidikan	4	4	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	3	Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit
1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3	2	Paket
1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2	3	Paket
1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4000	4000	Peserta Didik
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250	250	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1000	1000	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1250	1250	Orang
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3	Dokumen
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	4	Dokumen
1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	Ruang
1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	1	Unit
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8	12	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4	4	Unit
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	3158	3119	Orang
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1025	1075	Orang
1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200	200	Orang
1.01.02.2.03.0029 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	1	Komunitas
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	850	1100	Orang
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Ketersediaan Tutor Non Formal/Kesetaraan sesuai standar	100	100	Persen
	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar	83	72	Persen
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100	100	Persen
1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	1	Unit
1.01.02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	3	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	100	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100	77	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100	100	Orang
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	360	1117	Peserta Didik
1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7	7	Unit
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25	25	Orang
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang Memenuhi Standar	83	83	Persen
	Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Dasar sesuai standar	100	100	Persen
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100	100	Persen
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100	100	Persen
	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memberikan informasi pendidikan	263	271	Satuan Pendidikan
	Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100	100	Persen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
	Persentase Peserta Didik SD RMP yang diberi bantuan pendidikan	100	100	Persen
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	2	Ruang
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	Ruang
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	Ruang
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	21	Unit
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	Ruang
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Ruang
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Ruang
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	37	110	Paket
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	108	108	Paket
1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	9119	9119	Peserta Didik
1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7	7	Paket
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	1500	Peserta Didik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	520	520	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	426	426	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	460	460	Orang
1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10	10	Ruang
1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2	2	Konten Digital
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	2	Dokumen
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6	2	Dokumen
1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	Kegiatan
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	39126	9119	Paket
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	78	76	Ruang
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	10	Unit
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	481	481	Satuan Pendidikan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	124	73	Ruang
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4035	3890	Orang
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	351	351	Orang
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300	300	Orang
1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300	300	Orang
1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	1	Komunitas
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2300	2850	Orang
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memenuhi Standar	77	77	Persen
	Persentase Ketersediaan Pendidik Sekolah Menengah Pertama sesuai standar	100	100	Persen
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Standar Satuan Pendidikan	100	100	Persen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi	100	100	Persen
	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memberikan informasi pendidikan	75	75	Satuan Pendidikan
	Persentase Anak Tidak Sekolah yang diberi bantuan pendidikan	100	100	Persen
	Persentase Peserta Didik SMP RMP yang diberi bantuan pendidikan	100	100	Persen
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	2	Unit
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	2	Ruang
1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0	0	Unit
1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0	0	Unit
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11	25	Unit
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	78	83	Ruang
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Unit
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6	6	Paket
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	1	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16142	16142	Peserta Didik
1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	0	Paket
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000	3000	Peserta Didik
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	265	265	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	234	234	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	234	234	Orang
1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11	11	Konten Digital
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	Dokumen
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	Dokumen
1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	Kegiatan
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	265	265	Satuan Pendidikan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1	Ruang
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	22030	16142	Paket
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Ruang
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2748	2510	Orang
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	550	Orang
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	200	Orang
1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200	200	Orang
1.01.02.2.02.0054 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	1	Komunitas
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	940	1140	Orang
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal	87	87	Persen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	87	87	Persen
	Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	Persen
	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	Persen
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD yang disusun	2	2	Dokumen
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Non Formal yang disusun	2	2	Dokumen
1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	2	Dokumen
1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	2	Dokumen
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar yang disusun	2	2	Dokumen
	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah Pertama yang disusun	2	2	Dokumen
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	1	Dokumen
1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	1	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	1	Dokumen
1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	1	Dokumen
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Pendidik	50	50	Persen
	Persentase Sasaran Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Lainnya	50	50	Persen
	Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Pendidik	100	100	Persen
	Persentase Sasaran Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Lainnya	100	100	Persen
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	2	Dokumen
	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	2	Dokumen
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	2	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	Laporan
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	persen
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	15	15	Dokumen
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	Laporan
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Laporan
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persen
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9105	8989	Orang/bulan
1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	Laporan
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	4	Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Laporan
1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Laporan
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	Laporan
1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	Paket
1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dokumen
1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	Dokumen
1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240	290	Orang
1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	500	Orang
1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400	400	Orang
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	Persen
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	Paket
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket
1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	Dokumen
1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	Laporan
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4	Dokumen
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persen
1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	Persen
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	Persen

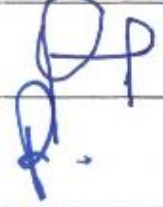
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Perubahan	Satuan
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117	121	Unit
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit
1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	30	Unit

Mengetahui :
Pit, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



TANTAN SYURYA SANTANA, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196701031989031005

Bandung, November 2024
Tim Reviu Renstra dan IKU: Dinas Pendidikan

1. Ketua Tim	Tantan Syurya Santana, S.Sos., M.Si	
2. Anggota	Dr. Edy Suparjoto, S.Pd., M.Pd	
3. Anggota	Drs. Abdul Gaos, M.Pd	
4. Anggota	Drs. Bambang Ariyanto, M.Pd	
5. Anggota	Dani Nurahman, S.Ap. M.AP	
6. Anggota	Candra Bakhtiar G, A.Md	